



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN KEPOLISIAN POLDA SUMSEL *melalui* AKSELERASI PEMENUHAN UNIT ORGANISASI 1 KECAMATAN 1 POLSEK/POLSUBSEKTOR



NAMA : SINTA, S.I.K.
NOSIS : 20240707012302
JABATAN : KABAG STRAJEMEN BIRORENA POLDA SUMSEL
NAMA COACH : Dr. Ir. MOMON RIVAI, M.Sc.
NAMA MENTOR: KBP TOTO WIBOWO, S.H., M.H.

**PKN TK.II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024
LAN RI – PUSDIKMIN POLRI**



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN KEPOLISIAN

POLDA SUMATERA SELATAN

MELALUI

AKSELERASI PEMENUHAN UNIT ORGANISASI

1 (SATU) KECAMATAN 1 (SATU) POLSEK/POLSUSBEKTOR

NAMA : SINTA, S.I.K.

NOSIS : 2024 0707012302

JABATAN : KABAG STRAJEMEN BIRORENA POLDA SUMSEL

INSTANSI : POLRI

NAMA COACH : Dr. Ir. MOMON RIVALI, M.Sc.

NAMA MENTOR : TOTO WIBOWO, S.H., M.H.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II ANGKATAN XXXI

TAHUN 2024



PERNYATAAN KOMITMEN
MENGIMPLEMENTASIKAN DAN KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN
PASCA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Peserta : SINTA, S.I.K.
NRP : 73090054
Jabatan : Kabag Strajemen Birorena Polda Sumsel
Judul Proyek Perubahan : Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian
Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit
Organisasi 1 Kecamatan 1 Polsek/ Polsusbektor

Nama Mentor : TOTO WIBOWO, S.H., M.H.
NRP : 66120666
Jabatan : Karorena Polda Sumsel
Np. Hp mentor : 0813 7767 1666

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa proyek perubahan yang merupakan indikator pencapaian hasil pelatihan kepemimpinan akan diintegrasikan dalam sasaran kinerja , jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Bersedia dan sanggup menyelesaikan dan menindaklanjuti target pencapaian milestone proyek perubahan jangka menengah dan panjang karena sejalan dengan Visi dan Misi Polda Sumsel termasuk penyediaan anggaran program dan kegiatan.
3. Akan melaporkan hasil implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang kepada penyelenggara pelatihan.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bersedia untuk dilaksanakan dengan sepuh tanggung jawab.

Palembang, 3 Desember 2024

Peserta

SINTA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73090054

Mentor

TOTO WIBOWO, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66120666



PERSETUJUAN MENTOR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mentor : TOTO WIBOWO, S.H., M.H.
NRP : 66120666
Jabatan : Karorena Polda Sumsel
Np. Hp mentor : 0813 7767 1666

Nama Peserta : SINTA, S.I.K.
NRP : 73090054
Nosis : 20240707012302
Jabatan : Kabag Strajemen Birorena Polda Sumsel
Instansi : Polri
Judul : Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui
Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan
1 (satu) Polsek/Polsubsektor

Dengan ini saya siap dan bersedia untuk menjadi pendamping/mentor peserta yang bersangkutan selama pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI mulai tanggal 29 Juli s.d 5 Desember 2024

Palembang, 3 Desember 2024

Mentor

TOTO WIBOWO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66120666

Peserta

SINTA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73090054



LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : SINTA, S.I.K.
NRP : 73090054
NOSIS : 20240707012302
JABATAN : KABAG STRAJEMEN BIRORENA POLDA SUMSEL
INSTANSI : POLRI
JUDUL : STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN KEPOLISIAN
POLDA SUMSEL MELALUI AKSELERASI
PEMENUHAN UNIT ORGANISASI 1 (SATU)
KECAMATAN 1 (SATU) POLSEK/ POLSUBSEKTOR

Bandung, 3 Desember 2024

Peserta

SINTA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73090054

Coach

Mentor

Dr. Ir. MOMON RIVAI, M.Sc
NIP 19610323199031004

TOTO WIBOWO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISINRP 66120666



LEMBAR PENGESAHAN

TELAH DIPRESENTASIKAN
DALAM SIDANG LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PADA HARI SELASA TIGA DESEMBER
TAHUN DUA RIBU DUA PULUH EMPAT

Bandung, 3 Desember 2024

Peserta



SINCA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73090054

Coach

Dr. Ir. MOMON RIVALI, M.Sc.
NIP 19610323199031004

Penguji

BUDI GAN GAN GUMILAR
NIP 19690520 199603 1 005



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis sebagai *project leader* dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI dapat menyelesaikan tugas akhir berupa proyek perubahan dengan Judul **“Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Pemenuhan Unit Organisasi 1 (Satu) kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”**.

Proyek Perubahan ini merupakan salah satu syarat yang harus dilalui oleh para peserta untuk lulus dalam pelatihan ini dan juga sebagai latihan kepemimpinan untuk menguji penguasaan keilmuan dan keterampilan dalam membuat perubahan dan menggerakkan stakeholder serta pembuatan keputusan.

Selesaiannya proyek perubahan ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, pendampingan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. KOMBES POL TOTO WIBOWO, S.H., M.H. Karorena Polda Sumsel, sebagai mentor yang telah menyetujui, mengarahkan dan mendukung proyek perubahan ini.
2. Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat untuk pengembangan dan keberlanjutan pelaksanaan proyek perubahan ini kedepannya.
3. Dr. Ir. MOMON RIVALI, M.Sc, sebagai Coach yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang baik yang berkaitan dengan teknis penyusunan proyek perubahan maupun wawasan kepemimpinan yang dapat memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan proyek perubahan ini.
4. Tim Efektif **“Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Pemenuhan Unit Organisasi 1 (Satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”**, serta Personel Birorena Polda Sumsel, Bidkum Polda Sumsel dan Bag Kerma Roops Polda Sumsel, serta Polres Jajaran Polda Sumsel, yang telah memberikan bantuan, masukan, dukungan maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan proyek perubahan ini;
5. Stakeholder yang telah memberi dukungan atas proyek perubahan ini.



6. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proyek perubahan ini.

Penulisan laporan proyek perubahan ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknis penulisan. Untuk itu penulis siap menerima saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan laporan proyek perubahan ini.

Palembang, 3 Desember 2024

Project leader

SNTA, S.I.K



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN	2
1.2.1 Tujuan Jangka Pendek	8
1.2.2 Tujuan Jangka Menengah	8
1.2.3 Tujuan Jangka Panjang	8
1.3. OUTPUT	8
1.3.1 Output Jangka Pendek	9
1.3.2 Output Jangka Menengah	9
1.3.3 Output Jangka Panjang	9
1.4. OUTCOME	9
BAB II HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	10
2.1. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN	10
2.1.1 Jangka Pendek	10
2.1.2 Jangka Menengah	26
2.1.3 Jangka Panjang	27
2.2. MANFAAT	27
2.2.1 Manfaat Internal	27
2.2.2 Manfaat Eksternal	27
2.2.3 Manfaat bagi Peserta	28
2.3. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN STRATEGIS	29
2.3.1 Membangun Kerjasama	29
2.3.2 Mamanfaatkan Peluang	29
2.3.3 Pemanfaatan Sumber Daya	29



2.4	IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	30
2.4.1	Diseminasi	32
2.4.2	Publikasi	33
2.5	KEBERLANJUTAN	34
2.6	PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR	35
2.6.1	Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi	35
2.6.2	Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi	39
2.7	KONTRIBUSI MATA PELATIHAN	40
2.7.1	Manajemen Pemerintahan	40
2.7.2	Kewajiban dan Tanggungjawab Negara	41
2.7.3	Membina Kerjasama Tim	42
2.8	LESSON LEARNED	43
BAB III PENUTUP		45
3.1	KESIMPULAN	45
3.2	TINDAK LANJUT	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN		48



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024

Daftar Gambar

1.	Gambar1.1	: Proyek Perubahan	5
2.	Gambar 1.2	: Analisis SOAR	7
3.	Gambar 2.1.1	: Surat perintah Kapolda Sumsel Tentang Tim Efektif	12
4.	Gambar 2.1.2	: Rapat Koordinasi Tim Efektif	13
5.	Gambar 2.1.3	: Undangan Rapat Tim Efektif	13
6.	Gambar 2.1.4	: Absensi Rapat	14
7.	Gambar 2.1.5	: Notula Rapat	14
8.	Gambar 2.1.6	: Draft Nota Kesepahaman	14
9.	Gambar 2.2.a	: Asistensi dengan Mentor	15
10.	Gambar 2.2.b	: Dukungan Stakeholder Internal	15
11.	Gambar 2.2.b.1:	Dukungan Kabidkum Polda Sumsel	15
12.	Gambar 2.2.b.2:	Dukungan Karolog Polda Sumsel	15
13.	Gambar 2.2.b.3:	Dukungan Karosdm Polda Sumsel	15
14.	Gambar 2.2.b.4:	Dukungan Wakapolda Sumsel	15
15.	Gambar 2.2.b.5:	Dukungan Wakapolda Sumsel	15
16.	Gambar 2.2.c.1:	Dukungan Pj. Bupati Lubuklinggau	15
17.	Gambar 2.2.c.2:	Dukungan Sekda Kab Lahat	15
18.	Gambar 2.2.c.3:	Dukungan Sekda kab OKU Timur	16
19.	Gambar 2.2.c.4:	Dukungan Sekda Kota Prabumulih	16
20.	Gambar 2.2.c.5:	Dukungan Pj. Bupati Banyuasin	16
21.	Gambar 2.2.c.6:	Dukungan Pj. Sekda Kota Palembang	16
22.	Gambar 2.3.1	: Dokumentasi Asistensi Polres Lahat	17
23.	Gambar 2.3.2	: Sprin Kapolda Sumsel tentang Asistensi	17
24.	Gambar 2.3.3	: ST Kapolda Sumsel tentang Asistensi	17
25.	Gambar 2.3.4	: Laporan Asistensi	17
26.	Gambar 2.4.1	: Rapat Penyusunan SOP	18



27.	Gambar 2.4.2 : SOP Usulan Pembentukan Polsek/ Polsubsektor	18
28.	Gambar 2.5.1 : Koordinasi Kabidkum	19
29.	Gambar 2.5.2 : Nota Dinas Kabidkum ke Karorena	19
30.	Gambar 2.5.3 : koordinasi Stakeholder	20
31.	Gambar 2.5.4 : Surat Pemkot Prabumulih hal Rapat TKKSD	20
32.	Gambar 2.6.1 : Rapat Penyusunan Jukrah Kapolda Sumsel	20
33.	Gambar 2.7.1 : Keputusan Kapolda dan Surat Kapolda Sumsel hal Jukrah Polsek dan Polres Lini Terdepan Pelayanan.....	22
34.	Gambar 2.8.1 : Surat Kapolda Sumsel hal Usulan Pembentukan Polsubsektor ke Kapolri	22
35.	Gambar 2.9.1 : Dokumentasi Penandatanganan Nota Kesepahaman Polres dan Pemkot	22
36.	Gambar 2.9.2 : Nota Kesepahaman	23
37.	Gambar 2.9.3 : Undangan	23
38.	Gambar 2.9.4 : Absensi	24
39.	Gambar 2.9.1 : Sprin Kapolda Sumsel Binteknis	25
40.	Gambar 2.9.2 : ST Kapolda Sumsel Binteknis	25
41.	Gambar 2.9.3 : Absensi Binteknis	25
42.	Gambar 2.9.4 : Surat Narasumber	25
43.	Gambar 2.9.5 : Dokumentasi kegiatan Binteknis	25
44.	Gambar 2.9.6 : Publikasi Binteknis di Medsos	25
45.	Gambar 2.4 : Strategi Marketing Proper	30
46.	Gambar 2.4.1 : Diseminasi Media Cetak/Koran	32
47.	Gambar 2.6 : Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran	35
48.	Gambar 2.6.1 : Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan	35



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024

Daftar Tabel

1.	Tabel 1.1	: Data Satwil TA. 2024	3
2.	Tabel 1.2	: Perbandingan Jumlah kec dengan Jumlah Polsek/Polsubsektor	3
3.	Tabel 1.3	: Data Polsek yang memiliki daerah hukum lebih dari 1 kecamatan	3
4.	Tabel 1.4	: Anev Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor Polda Sumsel 5 Tahun terakhir	4
5.	Tabel 2.1	: Out Put Key Project Decverables	11
6.	Tabel 2.2	: Waktu Pelaksanaan Perencanaan dan Implementasi Milestone	11
7.	Tabel 2.4.2	: Strategi Komunikasi	34
8.	Tabel 2.5.1	: Keberlanjutan Program	34
9.	Tabel 2.6.2.1	: Kertas Kerja Pengembangan Potensi Diri	39
10.	Tabel 2.6.2.2	: Kertas Kerja Pengembangan Kompetensi	40
11.	Tabel 2.9	: Kendala dan Solusi	44



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024

ABSTRAK

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” ;

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Arahan Presiden kepada Polri :

1. Rapim TNI Polri pada tanggal 28 Februari 2024, **Masalahan Kamtibmas harus di kawal ketat, penanganan isu harus dikawal cepat, Program Prioritas Nasional harus di kawal serius, kualitas pelayanan harus ditingkatkan dan kejahatan teknologi canggih harus diantisipasi**
2. Sambutan Presiden pada HUT Bhayangkara ke 78 Tahun 2024, Pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan serta daya saing kita di tengah kompetisi global sehingga **ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif, dan memiliki cara pandang strategis, harus menjadi *cooling system* dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan**, apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih.



Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerja sama untuk memperkuat keamanan negeri.

3. **Asta Cita adalah 8 misi yang diusung Presiden Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045* antara lain :**

- a. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- c. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- e. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Implementasi Asta Cita harus didukung dengan situasi kamtibmas yang kondusif, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan nyaman dan aman.

Sambutan Kapolri pada saat Musrenbang Polri Tahun 2024, Polri diharapkan terus **berada pada garda terdepan** dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat serta mendukung penuh reformasi birokrasi berdampak.



Anev Situasi Kamtibmas Polda Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2024, jumlah kasus yang terjadi 3.647, tersebar di 17 Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan, ini menunjukkan bahwa situasi Kamtibmas masih sangat memerlukan kehadiran personel Polri untuk mewujudkan rasa aman, mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Unit organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor yang ada di daerah hukum Polda Sumsel saat ini sejumlah 169 Polsek dan 10 Polsubsektor yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 241 kecamatan, jadi masih terdapat 74 Kecamatan yang belum memiliki Polsek/Polsubsektor, **terpenuhi 69,29 %**, berdampak pada 65 Polsek yang daerah hukumnya lebih dari 1 kecamatan (51 Polsek daerah hukum 2 kecamatan, 13 Polsek daerah hukum 3 kecamatan dan 1 Polsek daerah hukumnya 4 kecamatan).

Kendala di Polda Sumsel, terkait usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor adalah permasalahan lahan yang menjadi syarat utama usulan sesuai sesuai Perpol Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia) **Ps. 7 Persyaratan Pembentukan huruf d. Tersedia Lahan Untuk Kantor, Rumah Dinas/Asrama, Fasilitas Umum dan Sosial sesuai kebutuhan berdasarkan Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan;**

Sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu terpenuhinya 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor di Provinsi Sumatera Selatan, maka dilakukan Strategi Peningkatan layanan Kepolisian Polda Sumsel Melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor. Strategi Akselerasi ini ditekankan pada upaya pemenuhan dalam bentuk kebijakan Kapolda Sumsel agar usulan pembentukan Polsek/Polsubsektor menjadi atensi dari Polres/tabes jajaran Polda guna percepatan, Kolaborasi dengan Stakeholder terkait dalam hal ini Pemda dan masyarakat dalam hal pengadaan lahan yang menjadi syarat utama usulan pembentukan Unit Organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor.

Kata Kunci :

“Polsek/Polsubsektor Garda Terdepan Pelayanan Polri”

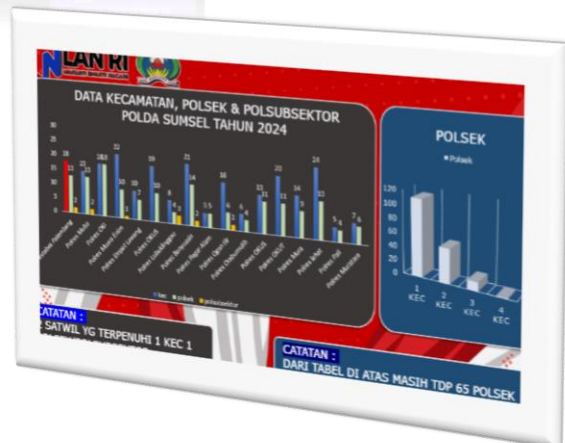


BAB I PENDAHULUAN

REKAPITULASI DATA SATWIL POLDA SUMSEL TA. 2024

NO	KESATUAN	TIPE POLSEK				JUMLAH	POLSUB SEKTOR	JUMLAH KEC
		METRO (A)	URBAN (B)	RURAL (C)	PRARURAL (D)			
1	POLDA SUMATERA SELATAN	-	8	6	-	14	2	18
2	POLRESTABES PALEMBANG	-	-	7	6	13	-	15
3	POLRES MUSI BANYUASIN	-	-	7	10	18	-	18
4	POLRES OGAN KOMERING ILIR	-	-	8	1	13	-	24
5	POLRES LAHAT	-	-	12	1	13	-	22
6	POLRES MUARA ENIM	-	-	10	-	10	1	5
7	POLRES PRABUMULIH	-	1	2	1	4	-	10
8	POLRES EMPAT LAHANG	-	1	5	1	7	-	8
9	POLRES LUBUKLINGSAU	-	-	4	-	4	3	8
10	POLRES BANYUASIN	-	1	8	5	14	2	21
11	POLRES OGAN KERING	-	-	3	2	5	2	5
12	POLRES PAGARALAM	-	-	5	1	6	-	16
13	POLRES PRABUMULIH	-	-	2	2	4	-	8
14	POLRES OGAN KOMERING ULU	-	-	7	4	11	-	13
15	POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR	-	1	5	5	11	-	20
16	POLRES OGAN KOMERING ULU SELATAN	-	-	5	5	10	-	19
17	POLRES MUSI RAWAS	-	-	9	9	9	-	14
18	POLRES MUSI RAWAS UTARA	-	-	6	-	6	-	7
JUMLAH		-	12	104	43	159	10	241

1. LUAS DAERAH HUKUM	121.501,50	1 POLDA 1 POLRESTABES 16 POLRES	74 KEC YG BLM ADA POLSEK/ POLSUBSEKTOR	<input type="checkbox"/> 12 SDH DIUSULKAN KE MBS <input type="checkbox"/> 9 DLM PROSES LENGKAP DOK POLDA <input type="checkbox"/> 4 SDH ADA LAHAM <input type="checkbox"/> 49 KEC YG BLM MLUKI LAHAM
2. JUMLAH PENDUDUK	11.246.672	12 POLSEK TIPE B / URBAN 94 POLSEK TIPE C / RURAL 41 POLSEK TIPE D / PRA RURAL 10 POLSUBSEKTOR		
3. JUMLAH KOTA	4			
4. JUMLAH KABUPATEN	13			
5. JUMLAH KECAMATAN	241			
6. JUMLAH KELURAHAN	396			



LAN RI – PUSDIKMIN POLRI
PKN TK.II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” ;

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri harus **berada pada garda terdepan** dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat serta mendukung penuh reformasi birokrasi berdampak, tentunya ini dapat diwujudkan bila sebaran layanan kepolisian berada sampai dengan tingkat Kecamatan.

Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat kehadiran polisi sebagai instrumen negara memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam menciptakan Harkamtibmas. Melalui polisi tujuan hukum untuk melindungi masyarakat akan menjadi kenyataan.

Topik judul ini diambil **karena dirasakan sangat dibutuhkan** melihat kondisi saat ini bahwa dari 241 Kecamatan yang ada di Provinsi Sumsel, 167 Kecamatan yang telah memiliki Polsek/Polsubsektor (159 Polsek dan 10 Polsektor) terpenuhi 69,29 %, terdapat **74 Kecamatan** yang **belum** memiliki Polsek/Polsubsektor. Dari data yang ada juga ini terdapat **65 Polsek** yang **membawahi lebih dari 1 Kecamatan** yaitu :

1. 1 Polsek membawahi 4 Kecamatan;

2. 13 Polsek membawahi 3 Kecamatan;
3. 51 Polsek yang membawahi 2 Kecamatan;
4. 99 Polsek/9 Polsubsektor yang membawahi masing masing 1 Kecamatan;

Dengan banyaknya jumlah kecamatan dalam daerah hukum Polsek, maka akan berdampak pada kurang optimalnya layanan kepolisian (luasnya wilayah, jumlah penduduk dan banyaknya aktivitas masyarakat).



Gambar 1. 1 Proyek Perubahan

Amanat Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Polri Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.

Berdasarkan regulasi tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap Polri di Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor di daerah hukum Polda Sumsel.

Kondisi saat ini

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang mengemban fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan alat negara yang berperan dan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan data di atas :

- a. Dari 241 Kecamatan di provinsi Sumsel, terbagi dalam daerah hukum di 159 Polsek dan 10 Polsubsektor, terpenuhi 167 Kecamatan yang memiliki Polsek Polsubsektor/69,2 % (masih terdapat 74 kecamatan yang belum ada Polsek/Polsubsektor);
- b. terdapat 65 Polsek yang membawahi lebih dari 1 Kecamatan antara lain :
 - 1) 51 Polsek dengan daerah hukum 2 Kecamatan;
 - 2) 13 Polsek dengan daerah hukum 3 Kecamatan;
 - 3) 1 Polsek dengan daerah hukum 4 Kecamatan;

NO	KEKAWAN	Tipe POLSEK				JUMLAH POLSEK SEKTOR	JUMLAH KEC	KET
		METRO (A)	URBAN (B)	RURAL (C)	PRARURAL (D)			
Polda Sumatera Selatan								
1	POLRESTABES PALEMBANG	-	8	6	-	14	2	18
2	POLRES MUSI BANYUASIN	-	-	7	6	13	-	15
3	POLRES OGAN KOMERING ILIR	-	-	8	10	18	-	18
4	POLRES LAHAT	-	-	12	1	13	-	24
5	POLRES MUARA ENIM	-	-	10	-	10	1	22
6	POLRES PENJAJAH ABAB LEMATANG ILIR	-	1	2	1	4	-	5
7	POLRES SEMBAT LAMANG	-	1	5	1	7	-	10
8	POLRES SURUNGGAU	-	-	4	-	4	3	8
9	POLRES BANYUASIN	-	1	8	5	14	2	21
10	POLRES PAGARALAM	-	-	3	2	5	-	5
11	POLRES OGAN ILIR	-	-	5	1	6	2	16
12	POLRES PRABUMULIH	-	-	2	2	4	-	8
13	POLRES OGAN KOMERING ULU	-	-	7	4	11	-	13
14	POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR	-	1	5	5	11	-	20
15	POLRES OGAN KOMERING ULU SELATAN	-	-	5	5	10	-	19
16	POLRES MUSI BAWAS	-	-	9	-	9	-	14
17	POLRES MUSI BAWAS UTARA	-	-	6	-	6	-	7
JUMLAH		-	12	104	43	159	10	241

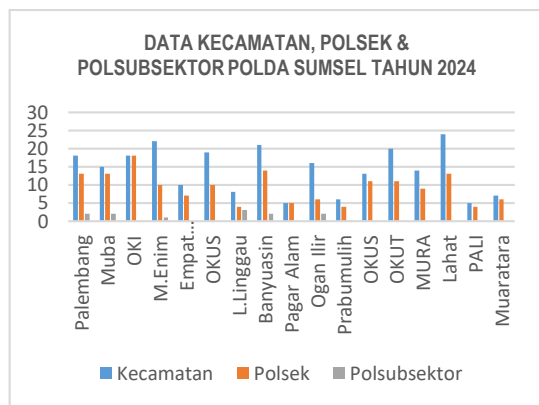
1. LUAS DAERAH HUKUM	121.581,50
2. JUMLAH PENDUDUK	11.246.672
3. JUMLAH KOTA	4
4. JUMLAH KABUPATEN	13
5. JUMLAH KEKAWAN	241
6. JUMLAH KELURAHAN	386
7. JUMLAH DESA	2.303

1 POLDA
1 POLRESTABES
16 POLRES
12 POLSEK TPE B / URBAN
104 POLSEK TPE C / RURAL
41 POLSEK TPE D / PRA RURAL
10 POLSUBSEKTOR

76 KEC YG BLM ADA POLSEK/ POLSUBSEKTOR
--

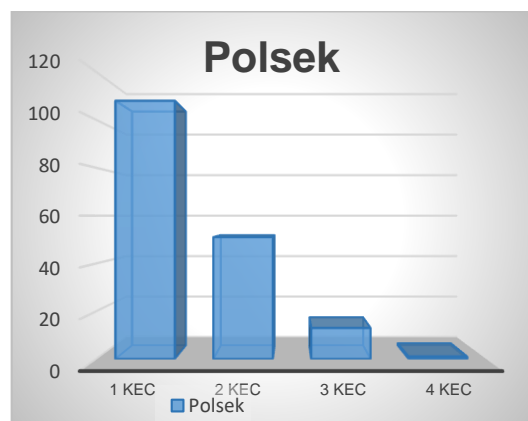
12 SDH DIUSULKAN KE MBS/MPNAN
4 USULAN KE MBS OKT 2024

Tabel 1.1 : Data Satwil Polda Sumsel Tahun 2024

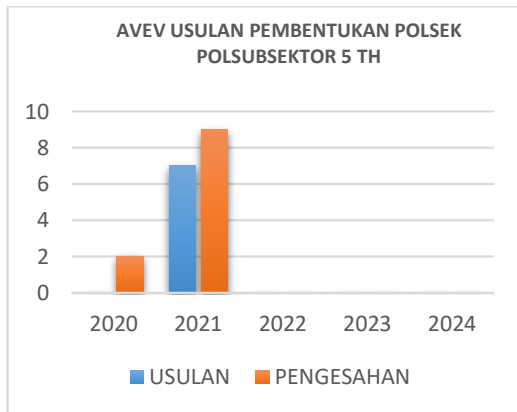


Tabel 1.2 : perbandingan jumlah Kecamatan dengan Polsek

Berdampak pada tidak maksimalnya layanan Polri kepada masyarakat karena luasnya daerah hukum di tingkat Polsek yang membawahi lebih dari 1 Kecamatan.



Tabel 1.3 : Data Polsek yang memiliki daerah hukum lebih dari 1 Kecamatan



Tabel 1.4 : Anev Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor Polda Sumsel 5 Tahun terakhir

Dari data diatas terlihat bahwa usulan dan Pengesahan dari tahun 2022 s.d. 2024, terdapat usulan dikarenakan kendala belum lengkapnya administrasi usulan dari Pemda.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis membuat Proyek Perubahan dengan judul: "Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor".

Kondisi yang Diharapkan (Kondisi Ideal)

Kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. terdapat instrumen percepatan Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor (SOP dan Surat Kapolda Sumsel);

- b. anggota Polri memiliki Komitmen untuk melakukan percepatan usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor begitu Hibah Lahan diterima (Proses Kesiapan Administrasi di percepat/menentukan target Waktu usulan);
- c. Komitmen Pimpinan Polri dan Stakeholder terhadap Akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor, dalam bentuk Perjanjian Kerjasama/PKS (antara Polres/tabel dan Pemda Kabupaten/Kota);
- d. Terpenuhinya 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor.

Gagasan Proyek Perubahan

Polda Sumsel telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun dengan masih terbatasnya Sumber Daya yang ada belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan layanan Kepolisian di karenakan terbatasnya Sumber Daya yang ada, baik dari SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana.

Data Satwil Polda Sumsel Tahun 2024 menunjukkan dari 241 Kecamatan di Provinsi Sumsel, baru terdapat 159 Polsek dan 10 Polsubsektor, **masih terdapat 74 Kecamatan yang belum**

memiliki Polsek/Polsubsektor, bahkan saat ini masih terdapat 65 Polsek yang membawahi lebih dari 1 Kecamatan antara lain :

- 51 Polsek dengan daerah hukum 2 Kecamatan;
- 13 Polsek dengan daerah hukum 3 Kecamatan;
- 1 Polsek dengan daerah hukum 4 Kecamatan;

Dari data diatas, dengan banyaknya kecamatan dalam daerah hukum Polsek, maka akan berdampak pada tidak maksimalnya layanan Kepolisian kepada masyarakat, dikarenakan terbatasnya sumber daya yang ada di Polsek (SDM dan Sarpras).

Untuk mewujudkan percepatan pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor maka perlu diperlukan strategi agar upaya yang dilakukan lebih terpadu dan terintegrasi antara Polri dan Stakeholder maupun masyarakat, untuk itu dibuat terobosan berupa **Inovasi peningkatan layanan Kepolisian yaitu Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor.**

Proyek Perubahan ini difokuskan pada Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel Melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi

1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor, melalui Akselerasi tersebut dapat diketahui dimensi-dimensi strategis yang harus dianalisis, dievaluasi dan ditingkatkan guna pemenuhan unit organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor.

Strategi untuk mewujudkan gagasan

Dalam upaya untuk melakukan strategi peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Pemenuhan Satu Kecamatan Satu Polsek/Polsubsektor dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dilakukan analisis **SOAR.**

Analisis SOAR terdiri atas empat elemen sebagai berikut:

- a. **Strength (S)** merupakan segala hal yang menjadi kekuatan dan kemampuan terbesar yang dimiliki, berupa aset baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud yang mampu mendukung keberlangsungan usaha. Kekuatan akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi di masa depan. Dalam hal ini *strength (S)* yang dimiliki Polda adalah: (1) adanya komitmen pimpinan guna akselerasi pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor; (2) ada dasar hukum yang kuat.

- b. **Opportunities (O)** merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang harus di analisis agar mudah memahami apa yang harus dilakukan agar dapat dimanfaatkan. Peluang akan memberikan manfaat bagi organisasi jika organisasi tersebut mampu meraih peluang tersebut dengan cepat dan tepat. Dalam kaitan ini, *opportunities (O)* yang dimiliki Polda adalah: (1) Adanya dukungan dari Pemda/Stakeholder dan masyarakat, (2) Adanya harapan masyarakat terhadap kinerja Polda dalam mewujudkan rasa aman.
- c. **Aspirations (A)** merupakan harapan, visi dan misi yang ingin dicapai guna membentuk kepercayaan diri terhadap produk, pasar dan hal apapun yang dikerjakan demi mencapai visi yang diharapkan sehingga munculah perasaan positif dan semangat dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan. Dalam hal ini *aspirations (A)* Polda adalah: (1) Mampu melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik. (2) Mampu melaksanakan penegakan hukum secara adil. (3) Rasa Aman bagi Masyarakat,

- d. **Results (R)** merupakan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini *results (R)* yang diharapkan dapat tercapai oleh Polda adalah: (1) Peningkatan Sebaran Layanan Kepolisian, (2) Keberadaan Personel Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat s.d. tingkat Kecamatan.

	Strengths (S)	Opportunities (O)
ANALISIS SOAR	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen Pimpinan tentang Akselerasi Pemenuhan 1 Kec 1 Polsek/Polsub sektor. Memiliki dasar hukum yang kuat. (Peraturan Polri) 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dari Pemda/Stakeholder. Adanya harapan masyarakat terhadap kinerja Polda dalam Harkamtib mas.
Aspirations (A)		
<ol style="list-style-type: none"> Mampu melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik. Mampu melaksanakan penegakan hukum secara adil. 	<p>Kemampuan Polda dalam meningkatkan layanan Kepolisian dengan Pemenuhan Unit Organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor dengan didukung oleh Komitmen Pimpinan dan dasar hukum yang kuat.</p>	<p>Kemampuan Polda dalam meningkatkan layanan Kepolisian dengan Pemenuhan Unit Organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor dengan didukung Pemda/stakeholder dan masyarakat.</p>

Results (R)		
1. Peningkatan Layanan Kepolisian 2. Keberadaan Personel Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat	Adanya Komitmen Pimpinan dan dasar hukum yang kuat akan mampu mendukung akselerasi usulan pembentukan/Peningkatan Polsek/Polsubsektor	mendayagukan dukungan dari Pemda/Sta keholder dan harapan masyarakat guna pemenuhan lahan dan bangunan sebagai syarat usulan pembentukan Polsubsektor di tingkat Kecamatan

Gambar 1.2 : Analisis SOAR

Berdasarkan analisis SOAR yang disajikan dalam tabel di atas, maka strategi yang dipilih adalah **SR Komitmen Pimpinan dan Dasar hukum yang kuat** serta **strategi OR memanfaatkan dukungan Stakeholder dan harapan masyarakat** terhadap Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui sebaran personel sampai dengan tingkat kecamatan (anggota Polri dapat hadir langsung dan berada di tengah-tengah masyarakat) maka Layanan Kepolisian kepada Masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu judul Proyek Perubahan ini adalah: **Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor.**

Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Adapun ruang lingkup proyek perubahan ini meliputi:

- penerbitan Keputusan Kapolda Sumsel tentang Pedoman Pembentukan Polsek/Polsubsektor di Daerah Humum Polda Sumsel dan Surat Kapolda tentang Jukrah Penguatan Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan, yang implementasinya melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor pada setiap Kecamatan;
- penyusunan SOP tentang Usulan pembentukan Polsek/Polsubsektor;
- melakukan kerja sama dengan Stake holder tentang Akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor;
- Asistensi dan BinteK Personel yang membidangi Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor;
- Usulan Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan setingkat Polsek/Polsubsektor;
- Analisa dan evaluasi pengukuran dan tindak lanjutnya.

Perspektif Baru dalam Proyek Perubahan

Keberadaan Polsek/Polsubsektor di 241 Kecamatan Provinsi Sumsel menjadi Garda Terdepan Pelayanan Polri. Sebaran Personel Polri Polda Sumsel sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil yaitu tingkat kecamatan. Dengan hadirnya personel Polri di tengah-tengah masyarakat berdampak pada Harkamtibmas yang kondusif, rasa Aman, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai dari pelaksanaan Proper ini adalah:

- Pembentukan Tim Efektif;
- Penyusunan SOP Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kasatuan Kewilayahan di Lingkungan Polda Sumsel;
- Rapat pembahasan penerbitan Keputusan dan Surat Kapolda Sumsel tentang Jukrah Penguatan Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan melalui Akselerasi pemenuhan 1 (satu)

Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor;

- Rapat Koordinasi Penyusunan Kerjasama dengan Pemda;
- Nota Kesepahaman antara Polres/Tabes dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara bertahap tentang Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor.

1.2.2. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari pelaksanaan Proper ini adalah:

- Rekapitulasi usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor;
- Monitoring;
- Analisa dan evaluasi;
- Surat Kapolda Sumsel Tinjau Anev Kelembagaan TA. 2024;

1.2.3. Tujuan Panjang

Terpenuhinya Sebaran Layanan Kepolisian sampai dengan tingkat Kecamatan, 241 Kecamatan di Provinsi Sumsel terdapat Polsek/Polsubsektor.

1.3. Output

Dalam mencapai keberhasilan rancangan proyek perbahan ini menghasilkan output seabg berikut :

1.3.1. Jangka Pendek

- a. Surat Perintah Kapolda Sumsel tentang Tim Efektif Implementasi Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor;
- b. Keputusan Kapolda Sumsel tentang Pedoman Pembentukan Polsek/Polsubsektor di Daerah Hukum Polda Sumsel;
- c. Dokumen Surat Kapolda tentang Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan setingkat Polsubsektor di Lingkungan Polda Sumsel ke Mabes Polri Sumsel;
- d. MOU dengan Pemda Kab/Kota di Provinsi Sumsel perihal Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor (secara bertahap);
- e. SOP tentang Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan di Daerah Hukum Polda Sumsel;

1.3.2. Jangka Menengah

- a. Rekap Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor.
- b. MOU dengan Pemda Kab/Kota di Provinsi Sumsel perihal Pemenuhan 1 Kecamatan 1

- c. Polsek/Polsubsektor (secara bertahap);
- d. Hibah Lahan dan bangunan dari Pemda;
- e. Analisa dan Evaluasi.

1.3.3. Jangka panjang

- Terpenuhinya 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor;

1.4. Outcome

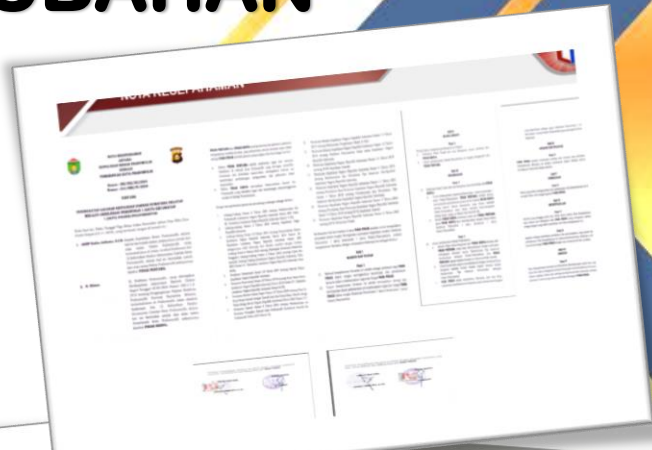
Outcome yang diharapkan dari implementasi proyek perubahan ini adalah Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumatera Selatan dengan Keberadaan Polsek/Polsubsektor pada setiap Kecamatan di Provinsi Sumsel secara bertahap dan berkesinambungan, karena ini merupakan salah satu strategi mengedepankan Polsek sebagai Lini Terdepan Pelayanan, sehingga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Layanan Kepolisian dan meningkatkan sebaran personel Polri sampai dengan tingkat Kecamatan.



BAB II

HASIL IMPLEMENTASI

PROYEK PERUBAHAN



LAN RI – PUSDIKMIN POLRI
PKN TK.II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024



BAB II

HASIL IMPELEMENTASI

PROYEK PERUBAHAN

2.1. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN

Berikut dijelaskan tahapan rencana strategi yang telah dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada jangka menengah dan jangka panjang, namun pada implementasinya bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka pendek; yaitu

1. Terbentuknya Tim Efektif;
2. Tersusunnya SOP tentang Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan di Daerah Hukum Polda Sumatera Selatan;
3. Tersusunnya Surat Keputusan Kapolda Sumsel dan Surat Kapolda Sumsel tentang Jukrah Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan;
4. Tersusunnya Nota Kesepahaman antara Polri dan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota tentang Peningkatan Layanan Kepolisian melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor;

5. Terlaksananya Asistensi kepada Satuan kewilayahan yang mengalami kendala usulan pembentukan Polsek/Polsubsektor;
6. Terlaksananya Bintek operator ABK dan SIK3 Bag Ren Polres/Tabes Jajaran Polda Sumsel;
7. Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor di daerah hukum Polda Sumsel kepada Kapolri.

2.1.1. Capaian Jangka Pendek (September s.d. Minggu 1 Desember 2024)

Dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan perlu disusun tahapan rencana sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Efektif;
2. Membangun Komitmen dengan Stakeholder;
3. Asistensi ke Satwil jajaran Polda Sumsel;
4. Penyusunan Nota Kesepahaman;
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Penyusunan Surat Keputusan Kapolda Sumsel tentang Pedoman Pembentukan Polsek/Polsubsektor di Daerah Hukum Polda Sumsel dan Surat Kapolda Sumsel tentang Jukrah Polsek dan Polres Lini Terdepan Pelayanan ;

7. Bimbingan Teknis kepada operator ABK dan SIK3 Bagren Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel;
8. Penandatanganan Nota Kesepahaman Polres/tabes dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Peningkatan Layanan Kepolisian melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubektor.

Output kunci (*key project deliverables*) dalam jangka pendek yang akan dihasilkan dalam proyek perubahan ini adalah sebagaimana **Tabel 2.1.** berikut :

Output Kunci	Deskripsi
Terbentuknya Tim Efektif	Pembentukan Tim Efektif untuk membantu pelaksanaan perubahan sesuai dengan yang telah direncanakan agar dapat mencapai tujuan secara tepat waktu.
Tersusunnya SOP tentang Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan di Daerah Hukum Polda Sumatera Selatan	Tersusunnya SOP tentang Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan di Daerah Hukum Polda Sumatera Selatan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Tersusunnya Surat Kapolda Sumsel tentang Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan	Tersusunnya Surat Kapolda Sumsel tentang Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan, sebagai dasar bagi Satwil (Polres/Tabes) untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan Pemda Kab/Kota.
Tersusunnya Nota Kesepahaman antara Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Peningkatan Layanan Kepolisian melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubektor	Tersusunnya Nota kesepahaman antara Polres/tabes dan Pemda Kab/Kota sebagai wujud komitmen bersama Akselerasi Pemenuhan 1 Kec 1 Polsek/Polsubektor
L terlaksana nya Asistensi kepada Satuan kewilayahan yang mengalami kendala usulan pembentukan	L terlaksana nya Asistensi dan Bintek Polres/Tabes Jajaran sebagai Akselerasi Pemenuhan 1 Kec 1 Polsek/Polsubektor

Polsek/Polsubektor dan Bintek Operator ABK dan SIK3 Bag Ren Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel	
Usulan Pembentukan Polsek/Polsubektor di daerah hukum Polda Sumsel kepada Kapolri	Usulan Pembentukan Polsek/Polsubektor di Daerah Hukum Polda Sumsel dalam bentuk kesiapan administrasi dan Surat Kapolda Sumsel kepada Kapolri.

Tahap Utama	Waktu Pelaksanaan	
	Rencana	Implementasi
Membentuk Tim Efektif	9 September 2024 s.d. 10 Oktober 2024	9 September 2024 (Rapat Koordinasi) 10 Oktober 2024
Membangun Komitmen dengan Stakeholder	September s.d. November 2024	5 September s.d. November 2024
Asistensi Ke Polres/Tabes	2 s.d. 4 Okt 2024	2 s.d. 4 Okt 2024
Penyusunan SOP	17 Oktober 2024	17 Oktober 2024
Penyusunan Draft Nota Kesepahaman	10 s.d. 21 Oktober 2024	21 Oktober 2024
Penyusunan Surat Kapolda Sumsel	22 s.d. 23 Oktober 2024	22 s.d. 23 Oktober 2024
Bintek Operatos ABK dan SIK3 Polres/Tabes	18 s.d. 19 Nopember 2024	18 s.d. 19 Nopember 2024
Usulan Pembentukan Polsek/Polsubektor ke Kapolri	September s.d. Des 2024	15 Okktober 2024

Tabel 2.2. Waktu Pelaksanaan Rencana dan Implementasi Milestone

1. Pembentukan tim efektif

Pembentukan tim efektif telah dilaksanakan pada bulan September 2024 dengan terbitnya **Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor: Sprin/166/IX/DIK.2.5./2024 tanggal 9 September 2024** tentang Tim Efektif peserta PKN Tingkat II angkatan XXXI tahun 2024 a.n. AKBP Sinta, S.I.K., NRP 73000054 selaku Kabagstrajemen Rorena Polda SUMSEL terkait pelaksanaan proyek perubahan tentang

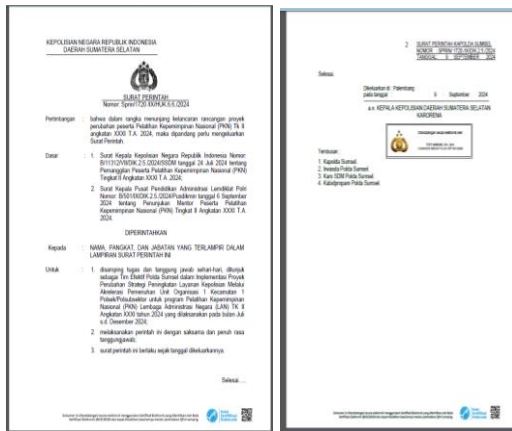
“Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubektor”.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu peserta PKN dalam mengimplementasikan proyek perubahan.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya kendala dan kesulitan, dan 100% tujuan kegiatan dapat dicapai.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan rapat tim Pokja dan pembagian tugas dalam membantu peserta PKN a.n. AKBP Sinta, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubektor”.

Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Rorena Polda SUMSEL. Penanggung jawab Kegiatan: AKBP Sinta, S.I.K. Stakeholders yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:



NO	AMBIK	IPER	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	SINTA, S.I.K.	AKBP	KABUPATEN/DAERAH KOTA	PAKSI/CIK LANGKAS	
2	S.I.K. RORENA	AKBP	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
3	S.I.K. SUNLUHKUM	AKBP	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
4	BALAKONGAN DENIA H.S.	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
5	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
6	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
7	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
8	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
9	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
10	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	
11	IBRAHIM	KORPRI	PAKSI/CIK LANGKAS	PAKSI/CIK LANGKAS	

NO	AMBIK	IPER	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	AMBIK	IPER	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
2	AMBIK	IPER	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
3	AMBIK	IPER	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
4	AMBIK	IPER	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK

Gambar 2.1.1. Surat perintah Kapolda Sumsel tentang Tim Efektif

- a. Rapat koordinasi Tim efektif terkait Pembagian Tugas

- 1) Kabagstrajemen (Peserta PKN);
- 2) Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sumsel;
- 3) PS kasubbidBankum
- 4) Bidkum Polda Sumsel;
- 5) PS Kasubbagstrabang Bagstrajemen Rorena Polda Sumsel;
- 6) Kasubbag Pakat Bag kerma Roops Polda Sumsel;
- 7) Kasubbag Koorprogmovev Bag Kerma Roops Polda Sumsel;

- 8) Paursisjemen Bagstrajemen Rorena Polda Sumsel;
- 9) PS Paurstrabang Bagstrajemen Rorena Polda Sumsel;
- 10) Paur Subbag Koormonev Bag Kerma Roops Polda Sumsel;
- 11) Ps. Paur Sisyuman Roops Polda Sumsel;
- 12) Bamin Bagstrajemen Rorena Polda Sumsel;

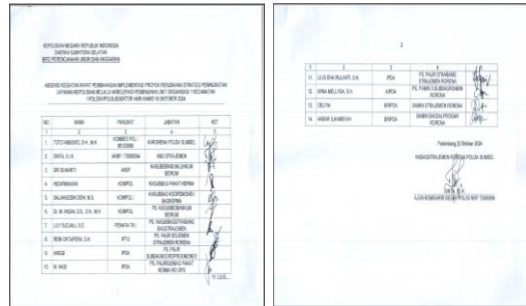
Kegiatan ini dalam dilaksanakan sesuai rencana, tanpa hambatan dan dengan perkiraan keberhasilan 100%. Hasil kegiatan berupa pembagian tugas dalam rangka mendukung implementasi proyek perubahan terkait pelaksanaan proyek perubahan.



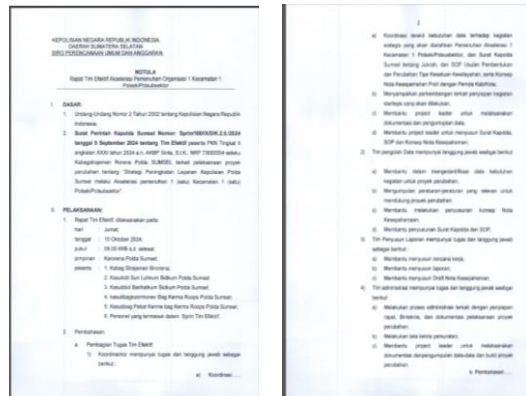
Gambar. 2.1.2 Rapat koordinasi Tim efektif terkait Pembagian Tugas



Gambar 2.1.3 Undangan Rapat Tim Efektif tanggal 10 Oktober 2024



Gambar 2.1.4 Absensi Rapat tanggal 10 Oktober 2024



Gambar 2.1.5 Notula Rapat



Gambar 2.1.6 Nota Dinas dari Karorena kepada Kabidkum Polda Sumsel

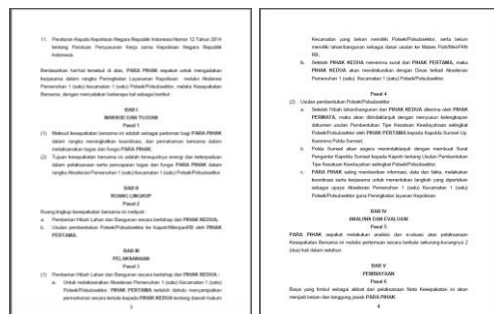
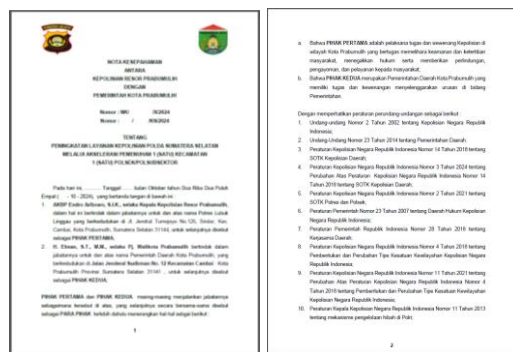
1. Membangun Komitmen dengan Stakeholder

a. Asistensi dengan Mentor

Sebelum pelaksanaan proyek perubahan, Project leader melaksanakan asistensi dengan Mentor Kombes Pol Toto Wibowo, S.H., M.H. Karorena Polda Sumsel untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam melaksanakan Proyek Perubahan “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubektor”.

Pada proses diskusi dan konsultasi ini mentor memberikan arahan agar :

- 1) Melakukan update data Satwil Polda Sumsel TA. 2024;
- 2) Menyajikan data jumlah Kecamatan yang belum memiliki Polsek/polsubsektor;
- 3) Menyajikan data kecamatan yang telah memiliki lahan dan atau bangunan;
- 4) Menyusun produk hukum untuk melaksanakan proyek perubahan;
- 5) Kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder khususnya Pemda yang



Gambar 2.1.7 Draft MOU/Nota Kesepahaman

akan memberikan hibah lahan dan atau bangunan.



Gambar. 2.2.a Asistensi dengan mentor tanggal 9 September , 18 Oktober 2024



Dukungan Mentor Tanggal 18 November 2024

- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder internal
 Dukungan dan Komitmen para stakeholder diperoleh dengan melakukan komunikasi aktif, persuasif dan argumentative gagasan dan rencana implementasi proyek perubahan ini. Melalui beberapa kesempatan. Kegiatan dilaksanakan dari Bulan September s.d. Desember 2024. Dukungan Stakeholder internal diperoleh dari Kabidkum Polda Sumsel.



Gambar 2.2.b.1 Koordinasi Kabidkum Polda Sumsel



Gambar 2.2.b.1 Dukungan Kabidkum Polda Sumsel



Gambar 2.2.b.2 Dukungan Karolog Polda Sumsel



Gambar 2.2.b.3 Dukungan Karosdm Polda Sumsel



Gambar 2.2.b.4 Dukungan Wakapolda Sumsel



Gambar 2.2.b.5 Dukungan Kapolda Sumsel

c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder eksternal
 Selain itu, komunikasi dengan stakeholder eksternal (instansi di luar Polda Sumsel) juga dilakukan komunikasi dengan stakeholder eksternal guna membangun hubungan dan komitmen terkait Akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsusbektor. Dukungan komitmen dari stakeholder eksternal antara lain :

1) Pj. Bupati Lubuk Linggau



Tanggal 5 September 2024

Gambar 2.2.c.1 Dukungan Komitmen dari Pj. Bupati Lubuk Linggau

2) Sekda Kabupaten Lahat



Tanggal 5 September 2024

Gambar 2.2.c.2 Dukungan Komitmen dari Sekda Kab Lahat

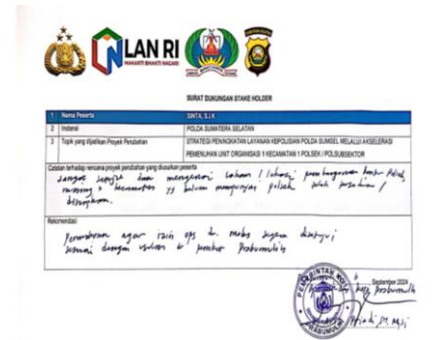
3) Sekda Kabupaten OKU Timur



Tanggal 5 September 2024

Gambar 2.2.c.3 Dukungan Komitmen dari Sekda Kab OKU Timur

4) Sekda Kota Prabumulih



Tanggal 6 September 2024

Gambar 2.2.c.4 Dukungan Komitmen dari Sekda Kota Prabumulih

5) Pj. Bupati Banyuasin





Tanggal 9 September 2024

Gambar 2.2.c.5 Dukungan Komitmen dari Pj. Bupati Banyuwangi

6) Pj. Sekda Kota Palembang



Tanggal 10 September 2024

Gambar 2.2.c.6 Dukungan Komitmen dari Pj. Sekda Kota Palembang

2. Asistensi ke Polres

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Asistensi kepada Polres yang telah memiliki Lahan dan bangunan tetapi belum mengusulkan ke Polda Sumsel. Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Oktober 2024 bertempat di Polres Lahat. Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai rencana dengan perkiraan keberhasilan 100%

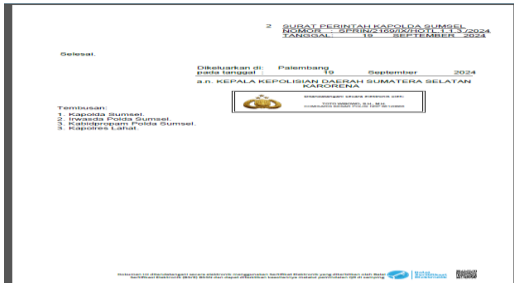
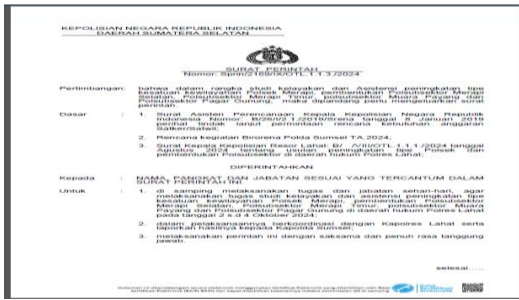
Stakeholders yang menghadiri kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kabagstrajemen (Peserta PKN);
- 2) PS Kasubbagstrabang Bagstrajemen;
- 3) Paursisjemen Bagstrajemen;
- 4) PS Paurstrabang Bagstrajemen;
- 5) Bamin BagstrajemenKapolda SUMSEL;
- 6) Kabagren Polres Lahat;
- 7) Kapolsek yang akan mengusulkan pembentukan Polsubsektor;
- 8) Kaisum Polsek yang akan mengusulkan pembentukan Polsubsektor.

Hasil kegiatan yang dicapai adalah Asistensi berjalan dengan baik, administrasi usulan pembentukan Polsubsektor di daerah hukum Polres Lahat dapat di susun.



Gambar 2.3.1 Dokumentasi kegiatan Asistensi di Polres Lahat



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN SPESIAL KAPOLDA SUMSEL
KORPRI
ANGKUTAN TIRIS
19 SEPTEMBER 2024

MEMORANDUM
DARI : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
KE : KEPALA POLSEK/POLSUBSEKTOR

NO.	R.M.A.	FUNGSI/TIM	JABATAN	KELOMPOK
1.	TOTO WICAKO, S.H., M.H.	AKBP/1300054	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB
2.	SINTA, S.I.K.	AKBP/1300054	KABAGSTRAJEMEN RORENA	KETUA TIM
3.	BENI OKTAPERA, S.H.	IP/17100072	PIR PAJUR SUBBAGSISAMEN RORENA	ANGGOTA
4.	LILIS EHA RULANTI, S.H.	IP/DA8110086	PIR PAJUR SUBBAGSTRANAMEN RORENA	ANGGOTA
5.	WINA MELLYSA, S.H.	AP/DA8110047	PIR SUBBAG 3 SUBBAGSISAMEN RORENA	ANGGOTA
6.	FEBRIANAYAH, S.Sos	AP/DA8110087	SIAMIN BAG REP RORENA	ANGGOTA
7.	ABEL LHAM PRATAMA	BIP/DA8110075	SUBBAGSISAMEN RORENA	ANGGOTA

Dibawahi di Palembang, 19 September 2024
A.N. KEPALA POLSEK/POLSUBSEKTOR KARORENA

Gambar 2.3.2 Surat Perintah Kapolda Sumsel



Gambar 2.3.3 ST Kapolda Sumsel



Gambar 2.3.4 laporan Pelaksanaan tugas Asistensi

3. Rapat pembahasan SOP Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan setingkat Polsek/Polsubsektor.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan pada

Rabu, tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Rorena Polda Sumsel, dengan penanggung jawab AKBP SINTA, S.I.K.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pembahasan terhadap konsep SOP Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan, yang akan dijadikan dasar hukum pelaksanaan Proyek Perubahan ini. Kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana tanpa hambatan dengan perkiraan keberhasilan 100%.



Gambar 2.4.1 Rapat Penyusunan SOP

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN	Nomor SOP : SOP/ 30/2024/Rovena Tanggal Pembuatan : 17 Oktober 2024 Tanggal Revisi : - Tanggal Penetapan : 19 Oktober 2024 Disahkan Oleh : Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran	
	 Nama SOP: Penyusunan Dokumen Pendukung Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek/Polsubsektor	
	Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Peraturan Poin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. 5. Peraturan Poin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Poin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. 6. Peraturan Poin Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. 7. Peraturan Poin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Poin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kualifikasi Pribadi 1. Memahami bentuk pengajian, pemantauan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Poin pada tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. 2. Memahami bentuk penyusunan Peraturan Kapitol. 3. Pengaturan administrasi dengan menggunakan aplikasi E-Office dan mempedomani protokol kesetiaan.
	Keterangan 1. SOP Penyusunan Rencana Strategis Polda Sumsel. 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Polda Sumsel. 3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Polda Sumsel. 4. SOP Penyusunan Naskah Akademik tentang Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan.	Peralatan/Perlengkapan 1. Literatur/Referensi: Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran. 2. ATK dan mesin fotokopi. 3. Komputer, printer dan jaringan internet.
Penetapan Apabila SOP ini tidak dipromosikan: 1. Tidak terwujudnya organisasi efektif dan efisien di dalam prakarya. 2. Tidak optimalnya pembagian kerja yang diberikan untuk setiap anggota. 3. Tidak tercapainya tujuan dengan mudah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya	Pencatatan dan Pendaftaran Pengendalian administrasi dan pendataan dilakukan secara manual melalui buku agenda berdasarkan prosedur dan Sabel terkait dan secara elektronik melalui media computer dan internet.	

4. Rapat Koordinasi menyusun Nota Kesepahaman dengan Pemda terkait Akselerasi pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor.

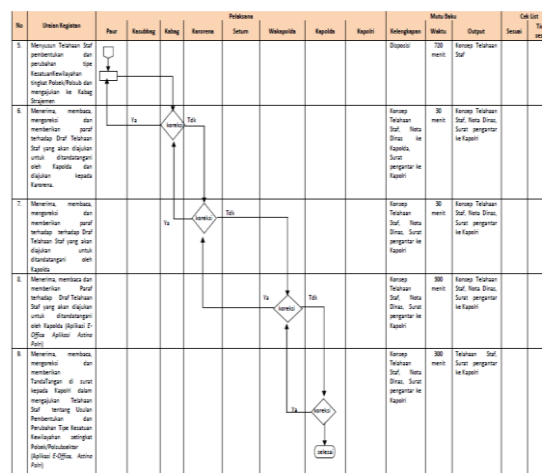
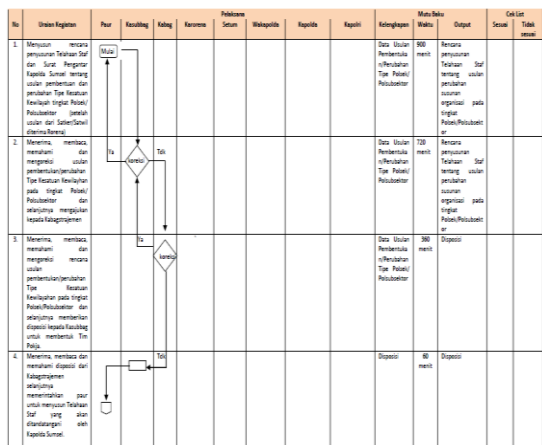
Kegiatan Rapat Koordinasi ini

bertujuan untuk melakukan koordinasi penyusunan Nota Kesepahaman Polri dengan Pemda untuk membantu peserta PKN a.n. AKBP Sinta, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”.

Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 bertempat di ruang kerja Kabidkum Polda Sumsel. Stakeholders yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kabidkum Polda Sumsel KBP Tulus Sinaga, S.I.K, S.H., M.H.;
- 2) Kabag Strajemen (Peserta PKN);
- 3) Kasubbbidsunluhkum Bidkum Polda Sumsel.

Hasil kegiatan adalah (1) Draft Konsep Nota Kesepahaman. Kegiatan dapat terlaksana tanpa hambatan dengan perkiraan keberhasilan 100%.



Gambar 2.4.2 SOP Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor



Gambar 2.5.1 Gambar Koordinasi dengan Kabidkum Polda Sumsel

Hasil koordinasi dengan kabidkum, disarankan :

- 1) Nota Kesepahaman di laksanakan oleh Polres jajaran Polda Sumsel;
- 2) Polda Sumsel membuat Jukrah ke jajaran untuk implementasi Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Polres dengan Pemda setempat.



Gambar 2.5.2 Nota Dinas dari Kabidkum kepada Karorena Polda Sumsel

5.1. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Konsep Nota Kesepahaman

Dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang;

Stakeholders yang hadir dalam kegiatan:

- 1) Sekda Kota Prabumulih;
- 2) Kabag Strajemen (Peserta PKN);
- 3) Kabag Kerma Roops Polda Sumsel;
- 4) Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Sumsel



Gambar 2.5.3 koordinasi dengan Stakeholder, Sekda Kota Prabumulih



Gambar 2.5.4 surat dari Pemkot hal Rapat Teknis TTKSD

5. Penyusunan Keputusan Kapolda Sumsel dan Jukrah Kapolda Sumsel

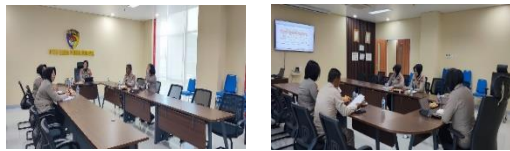
Kegiatan penyusunan Surat Kapolda Sumsel ini bertujuan untuk membantu peserta PKN a.n. AKBP SINTA, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023 bertempat di Ruang Bag Strajemen Birorena Polda Sumsel. Sebagai penanggung jawab kegiatan AKBP Sinta, S.I.K.

Stakeholders yang hadir dalam kegiatan penyusunan ini adalah:

- 1) Kabag Strajemen (Peserta PKN);
- 2) Ps Kasubag Strabang Bag Strajemen Rorena;
- 3) Paur Sisjemen Bag Strajemen;
- 4) Ps. Paur Strabang Bag Strajemen;
- 5) Bamin Bag Strajemen.

Kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana tanpa hambatan dengan perkiraan keberhasilan 100%.



Gambar 2.6.1 Rapat Penyusunan Jukrah Kapolda Sumsel

6. Penandatanganan Keputusan Kapolda dan Surat Kapolda Sumsel Jukrah hal Penguatan Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan;

Kegiatan penandatanganan Surat Kapolda Sumsel ini bertujuan untuk membantu peserta PKN a.n. AKBP SINTA, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan

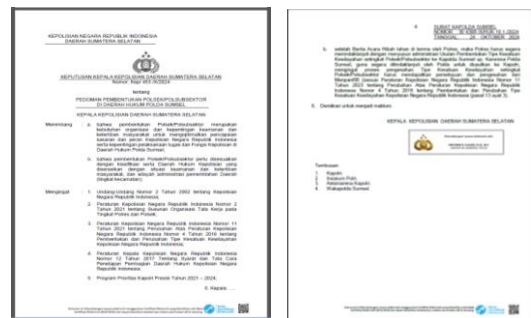
Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, melalui Aplikasi Astina/E Office Polda Sumsel. Sebagai penanggung jawab kegiatan AKBP Sinta, S.I.K.

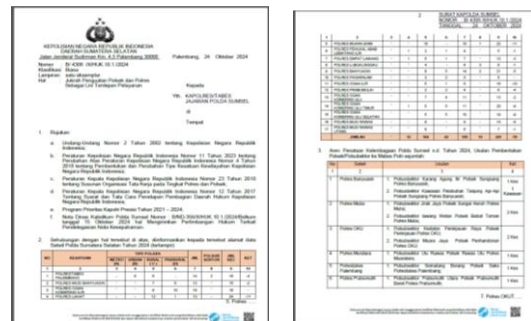
Stakeholders yang hadir dalam kegiatan penandatanganan Keputusan Kapolda Sumsel ini adalah:

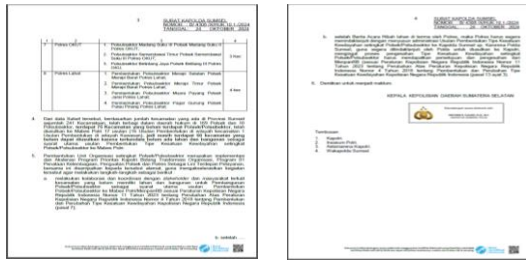
- 1) Kapolda Sumsel;
- 2) Rorena Polda Sumsel;
- 3) Setum Polda Sumsel.

Kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana tanpa hambatan dengan perkiraan keberhasilan 100%.



Keputusan Kapolda Sumsel





Gambar 2.7.1 Kep Kapolda Sumsel dan Jukrah Kapolda Sumsel

7. Usulan Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan di daerah hukum Polda Sumsel kepada Kapolri.

Kegiatan ini target adalah utama Proyek Perubahan untuk membantu peserta PKN a.n. AKBP Sinta, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”.

Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.

Adapun Kecamatan yang diusulkan dibentuk Polsubsektor adalah :

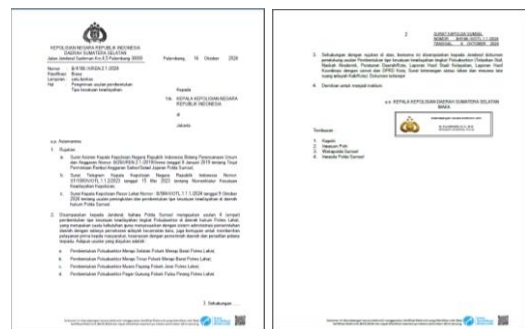
- 1) Polsubsektor Merapi Selatan Polsek Merapi Barat Polres Lahat;
 - 2) Polsubsektor Merapi Timur Polsek Merapi Barat Polres Lahat;
 - 3) Polsubsektor Muara Payang Polsek Jarai Polres Lahat;
 - 4) Polsubsektor Pagar Gunung Polsek Pulau Pinang Polres Lahat.
- Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Oktober dan Rabu 16

Oktober 2024 bertempat di Rorena Polda Sumsel, untuk dikirim melalui ekspedisi ke Jakarta Mabes Polri.

Stakeholders yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kabagstrajemen (Peserta PKN);
- 2) PS Kasubbagstrabang Bagstrajemen;
- 3) Paursisjemen Bagstrajemen;
- 4) PS Paurstrabang Bagstrajemen;
- 5) Bamin Bagstrajemen.

Hasil kegiatan adalah Surat Kapolda Sumsel tentang Usulan Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan setingkat Polsubsektor di Daerah Hukum Polda Sumsel. Kegiatan dapat terlaksana tanpa hambatan dengan perkiraan keberhasilan 100%.



Gambar 2.8.1 Surat Kapolda Sumsel tentang Pembentukan Polsubsektor

8. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polres dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini target utama Proyek Perubahan untuk membantu peserta

PKN a.n. AKBP Sinta, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”.

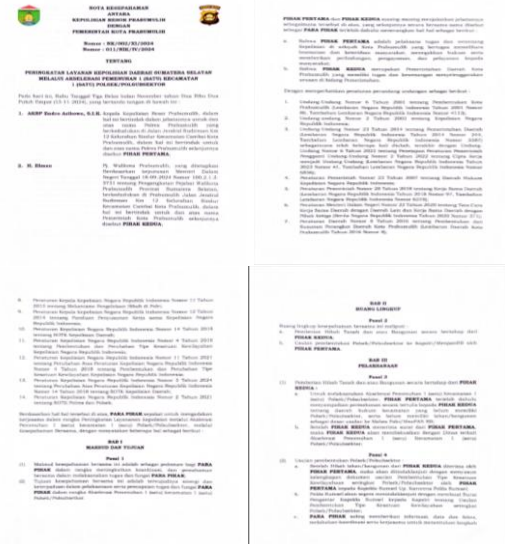
Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.

Penandatanganan MOU tentang Akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor, pada tahap Jangka Pendek dilaksanakan oleh Polres Prabumulih dengan Pemkot Prabumulih, kegiatan dilaksanakan di Polres Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dihadiri oleh :

- 1) Pj. Walikota Prabumulih;
- 2) Kapolres Prabumulih;
- 3) Sekda Kota Prabumulih;
- 4) Kabagstrajemen (Peserta PKN);
- 5) Inspektorat dan Kepala Dinas Kota Prabumulih;
- 6) Wakapolres Prabumulih;
- 7) Kabagren Polres Prabumulih;
- 8) Kabagops Polres Prabumulih;
- 9) Camat Kota Prabumulih;
- 10) Kapolsek;
- 11) Anggota Bagren Polres Prabumulih.



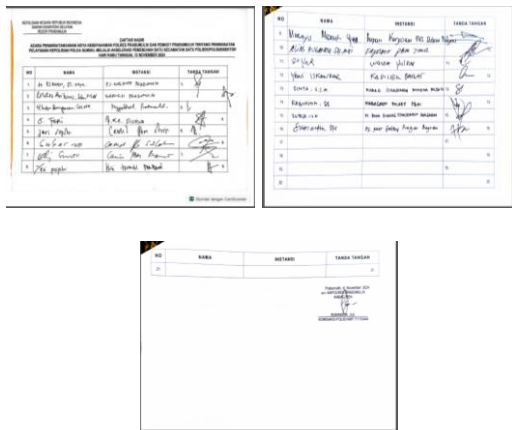
Gambar 2.9.1 Dokumentasi kegiatan



Gambar 2.9.2 Nota Kesepahaman yang ditandatangani



Gambar 2.9.3 Surat Undangan



Gambar 2.9.4 Absensi

9. Bintel ABK dan SIK3 kepada personel/operator ABK dan SIK3 Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel.

Kegiatan ini target utama Proyek Perubahan untuk membantu peserta PKN a.n. AKBP Sinta, S.I.K. dalam mengimplementasikan proyek perubahan judul “Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor”.

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis dan Jumat tanggal 14 s.d. 15 Nopember 2024 bertempat di Ballroom Hotel Emilia Palembang.

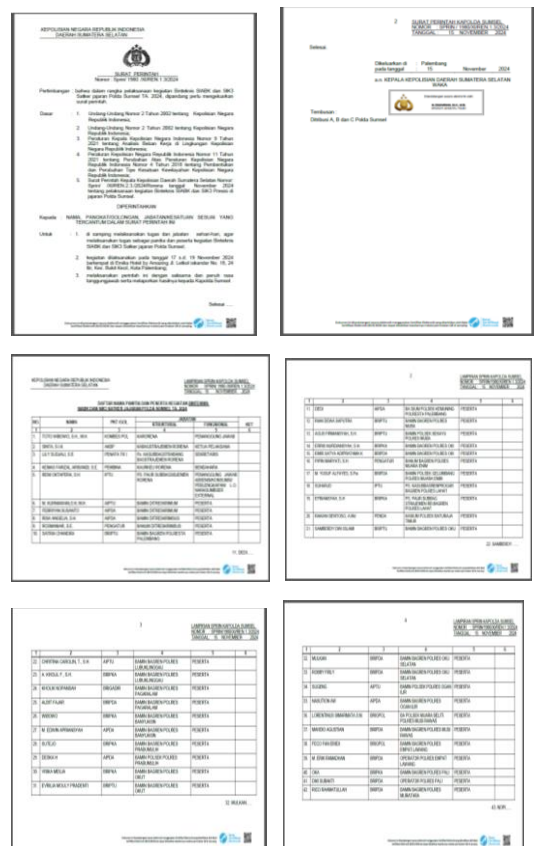
Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.

Stakeholders yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Karorena Polda Sumsel;
- 2) Kabagstrajemen (Peserta PKN);
- 3) BPS Prov Sumsel;

- 4) PS Kasubbagstrabang Bagstrajemen Biorena;
- 5) Paursisjemen Bagstrajemen Biorena;
- 6) PS Paurstrabang Bagstrajemen Biorena;
- 7) Bamin Bagstrajemen Biorena;
- 8) Operator ABK Satker dan Satwil jajaran Polda Sumsel;
- 9) Operator SIK3 Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel.

Hasil kegiatan adalah Kegiatan Bintel kepada Personel operator ABK Satker dan Satwil serta operator SIK3 (Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan). Kegiatan dapat terlaksana tanpa hambatan dengan perkiraan keberhasilan 100%.





Gambar 2.9.1. Surat Perintah Kapolda Sumsel tentang Binteknis



Gambar 2.9.4 Surat Kapolda Sumsel kepada Kepala BPS Prov Sumsel hal Narasumber



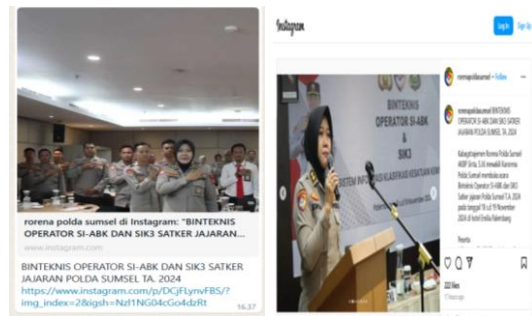
Gambar 2.9.2 Surat Telegram Kapolda Sumsel tentang Jadwal pelaksanaan Bintek



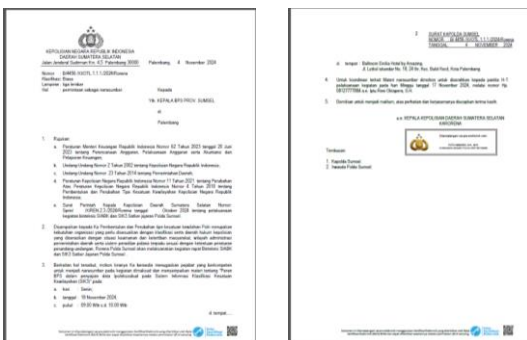
Gambar 2.9.5 Dokumentasi kegiatan Binteknis



Gambar 2.9.3. Absensi kegiatan Dokumentasi kegiatan



Gambar 2.9.6 Publikasi di PID Polda Sumsel dan IG Birorenasumsel





2.1.2. CAPAIAN TAHAPAN JANGKA MENENGAH

(Minggu II Des 2024 s.d. Juni 2025)

Proyek Perubahan ini memiliki tujuan jangka menengah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan s.d 1 (satu) Tahun sebagai berikut :

a. Mengusulkan Pembentukan Polsubsektor secara bertahap

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan Kepolisian Polda Sumsel, melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor. Kegiatan dapat dilaksanakan bila telah ada Hibah Lahan dari Pemda Kab/Kota atau Masyarakat. Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.

b. Anev Capaian Kinerja bidang Kelembagaan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terhadap hasil capaian kinerja bidang kelembagaan khususnya terkait Pemenuhan Unit Organisasi 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor. Penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.. Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan ini adalah

- 1) Kabagstrajemen (Peserta PKN);

- 2) Anggota Bag Strajemen Rorena Polda Sumsel.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Penyusunan laporan Anev; dan (2) Pembahasan penyusunan laporan Anev dilakukan selama 1 hari.

Kendala yang dihadapi adalah belum Tutup tahun Anggaran 2024, belum diketahui Usulan yang telah diajukan ke Mabes Polri/Menpan RB telah disetujui/pengesahan atau tidak. Tindakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pembahasan dan koordinasi penyusunan laporan Anev.

c. Nota Kesepahaman dengan Pemda Kab/Kota secara bertahap;

d. Tindak Lanjut Hasil Anev berupa Jukrah Kapolda Sumsel

Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Anev. Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun surat telegram Kapolda Sumsel. Selaku penanggungjawab kegiatan adalah AKBP Sinta, S.I.K.



2.1.3. TAHAPAN CAPAIAN JANGKA PANJANG

(Juli 2025 s.d. Des 2026)

Adapun tujuan jangka panjang proyek perubahan yang dapat dicapai dalam jangka waktu 2 s.d. 3 Tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya 1 (satu) Kecamatan 1 Polsek/polsubsektor, 241 Kecamatan di Provinsi Sumsel terbagi dalam daerah hukum di 241 Polsek/Polsubsektor;
- b. Sebaran personel Polri s.d. tingkat Kecamatan;
- c. Peningkatan Layanan Kepolisian kepada masyarakat;
- d. Terwujudnya Harkamtibmas di Daerah Hukum Polda Sumsel.

- b. Dapat memberikan dampak kepada internal Polri dan memberikan solusi guna mengoptimalkan peningkatan pelayanan publik khususnya dibidang Harkamtibmas dan Gakkum Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Sumsel dengan maksimalnya sebaran Layanan Kepolisian sampai dengan tingkat Kecamatan, hal ini sejalan dan merupakan implementasi dari Program Prioritas Kapolri Bidang Transformasi Organisasi Program Penataan kelembagaan, kegiatan Penguatan Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan pelayanan.

2.2. MANFAAT

Berikut merupakan manfaat atas pelaksanaan aksi perubahan ini, yaitu :

2.2.1. Manfaat Internal

Manfaat pelaksanaan Proper ini bagi pihak internal adalah sebagai berikut:

- a. SOP dan Surat Kapolda dapat menjadi alat dan metode untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel secara berkala dan berkelanjutan terkait Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan setingkat Polsek/Polsubsektor;

2.2.2. Manfaat Eksternal

Manfaat pelaksanaan Proyek perubahan ini bagi pihak eksternal adalah sebagai berikut:

- a. **Masyarakat** memperoleh pemahaman dan gambaran bahwa Polri telah melakukan transformasi di berbagai aspek khususnya pada aspek organisasi, aspek operasional, aspek pelayanan publik dan aspek pengawasan;
- b. Keberadaan Polsek/Polsubsektor di Tingkat Kecamatan tentunya akan berdampak dengan banyaknya personel Polri yang

berada di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, situasi ini akan mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, dan berpengaruh pada **Pemerintah Daerah** (Kabupaten/Kota/kecamatan) pelaksanaan IPOLEKSOSBUDHANKAM akan berjalan dengan baik, bahkan investor dan kehidupan masyarakat di sekitar Polsek/Polsubsektor akan berdampak;

2.2.3. Manfaat Bagi Peserta

- 1) Mengasah Kemampuan Strategic Leadership;
Dengan mengambil peran aktif dalam merumuskan regulasi dan Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor sebagai strategi peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel, kemampuan *strategic leadership* yang melibatkan kemampuan untuk melihat gambaran besar, mengidentifikasi tujuan jangka panjang, dan mengarahkan tim dalam mencapai perubahan yang signifikan dalam tatakelola kelembagaan;
- 2) Meningkatkan hubungan dengan stakeholder terkait;

- Dengan melibatkan pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya, peserta dapat membangun kemitraan dan kolaborasi yang kuat yang bertujuan untuk memperoleh dukungan, Sumber daya, dan informasi yang diperlukan dalam merealisasikan tujuan Akselerasi Pemenuhan 1 kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor;
- 3) Menumbuhkan jiwa kebersamaan
Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan produk administrasi/regulasi, menumbuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Kerja Tim efektif yang solid dapat dibangun dan dapat meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam tata kelola kelembagaan peningkatan layanan Kepolisian;
 - 4) Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi;
Dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik terhadap stakeholder internal, stakeholder eksternal dan Tim efektif, sangat mendukung keberhasilan dan terimplementasikan Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian melalui Akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor;

2.3. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Kepemimpinan strategis dapat digambarkan sebagai cara pemimpin di sebuah organisasi menyusun strategi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Strategi tersebut harus memetakan langkah- langkah yang harus diambil untuk beralih dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Identifikasi masalah organisasi dan melakukan *problem solving* dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas adalah bagian dari kompetensi dalam kepemimpinan strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan perubahan ke kondisi yang diinginkan, *project leader* menjalankan beberapa proses kepemimpinan strategis yaitu :

2.3.1. Membangun Kerjasama

Dalam penyusunan proyek perubahan ini, *project leader* membangun kerja sama dengan berbagai pihak baik pihak internal Bag Kerma Biro Operasi Polda Sumsel dan Bidkum Polda Sumsel maupun pihak eksternal. Contoh kerja sama dalam penyusunan regulasi dan Konsep Nota Kesepahaman antara Polres/tabas dan Pemda Kab/Kota. Selain itu, *project leader* melibatkan Polres jajaran khususnya Bag Ren

Polres jajaran untuk implementasi Proyek Perubahan.

Project leader juga melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal seperti pj. Bupati Banyuasin dan Pj. Sekda Prabumulih terkait saran masukan penyusunan Nota Kesepahaman dan akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor;

2.3.2. Memanfaatkan peluang

Sebagai *project leader*, dalam melaksanakan proyek perubahan perlu dengan cermat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu peluang yang telah dimanfaatkan adalah Komitmen dari Pimpinan untuk meningkatkan layanan Kepolisian, Rsa Aman yang mutlak ada demi terwujudnya Harkamtibmas yang berpengaruh pada IPOLEKSOSBUDHANKAM suatu wilayah Kab/Kota. Hari Libur dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal;

2.3.3. Pemanfaatan Sumber Daya

Selama melaksanakan proyek perubahan, pemanfaatan sumber daya organisasi telah dilaksanakan dengan baik oleh *project leader*. Optimisasi sumber daya yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada di bagian Strajemen Birorena Polda Sumsel, sehingga pembiayaan



proyek perubahan ini memanfaatkan sumber anggaran yang sudah ada dalam DIPA Birorena Polda Sumsel. Tim efektif terbagi dalam 4 Pokja kecil yaitu Pokja 1 Tim Penyusunan laporan, Pokja 2 Tim Penyusunan Regulasi, Pokja 3 Tim Penyusunan Konsep Nota Kesepahaman, Tim 4 Operator Administrasi.

Pokja 1 terdiri dari Personel Bag Strajemen Birorena Polda Sumsel yang berperan membantu membuat dan mempersiapkan administrasi laporan Proyek perubahan. Pokja 2 terdiri dari personel Bidkum Polda Sumsel yang berperan membantu memberikan saran masukan terkait produk administrasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik SOP maupun Nota Kesepahaman. Tim Pokja 3 terdiri dari personel Bagkerma Roops Polda Sumsel, yang berperan membantu dan memberikan saran proses koordinasi penyusunan MOU/Nota Kesepahaman dengan stakeholder eksternal. Tim Pokja 4 terdiri dari operator Birorena Polda Sumsel yang berperan melakukan pendokumentasian, publikasi dan tugas administrasi lainnya dalam proyek perubahan.

Dengan kepemimpinan yang baik, semua sumber daya ini berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan implementasi proyek perubahan.

2.4. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Strategi marketing dilakukan agar para stakeholder pada akhirnya mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder, pemetaan strategi dan strategi yang akan dilakukan sehingga pra stakeholder akan mendukung dan memberikan kontribusi terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Marketing sektor public atau pemasaran di lingkungan organisasi pemerintahan adalah suatu pendekatan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang akan dihasilkan oleh organisasi. Sesuai dengan Kotler dan Lee tujuan dan manfaat dari marketing adalah meningkatkan peran, meningkatkan layanan, meningkatkan pembelian atas yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, meningkatkan perilaku cinta dan perlindungan lingkungan, menurunkan biaya penyelenggaraan dan mendukung masyarakat.

Formula yang dilakukan dalam penerapan proyek perubahan ini adalah marketing **mix 4P**. Dengan formula ini diharapkan/diarahkan kepada **product** yang ditargetkan sampai kepada **customer** melalui **price**, **place** dan **promotion**.



Gambar 2.4. Strategi Marketing Proper

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini dilaksanakan dengan mengacu pada tools 5 P yaitu people atau customer (pelanggan), place (tempat), price (harga), promotion dan product.

1. *People/Customer* (pelanggan) adalah Customer merupakan elemen yang paling penting dalam pemasaran sektor publik, karena customer merupakan awal dan akhir dari proses pemberian layanan. Dalam proyek perubahan ini yang menjadi customer adalah masyarakat.
2. *Place* (tempat) merupakan elemen rigid dalam manajemen pemasaran, dikarenakan sifatnya tetap dan sulit untuk diubah. Dalam proyek perubahan ini yang menjadi place atau tempat adalah Kecamatan yang belum memiliki Polsek/Polsubsektor (74 Kecamatan).

3. *Price* (biaya) adalah dapat diartikan sebagai pengorbanan waktu dan pikiran yang dikeluarkan untuk terlaksananya Proper ini, 241 Kecamatan di Provinsi Sumsel terbagi dalam 241 Polsek/Polsubsektor.
4. *Promotion* atau sosialisasi. Kegiatan promotion dilaksanakan melalui sosialisasi hasil pelaksanaan Proper baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. *Product* dari proyek perubahan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. SOP tentang Usulan Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan;
 - b. Jukrah Kapolda Sumsel tentang Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor di daerah hukum Polda Sumsel;
 - c. Nota Kesepahaman dengan Pemda Kab/Kota tentang Akselerasi Pemenuhan 1 kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor;
 - d. Usulan Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayahan setingkat Polsek/Polsubsektor;
 - e. Binteks personel (operator SI-ABK Presisi dan Operator SIK3).



2.4.1. Diseminasi

Dalam implementasi strategi peningkatan layanan kepolisian melalui akselerasi pemenuhan 1 kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor terutama dalam aspek diseminasi dan publikasi, telah dibangun beberapa strategi yang efektif dengan stakeholder internal dan eksternal. Media massa dimanfaatkan sebagai sarana publikasi, sehingga masyarakat mengetahui transformasi organisasi yang dilakukan oleh Polda dalam meningkatkan layanan kepolisian dengan mengedepankan Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan Polri.

Melalui Desemisasi yang efektif, diharapkan dapat mengajak semua elemen masyarakat dan stakeholder eksternal untuk membantu Akselerasi Pemenuhan 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor.



Gambar 2.4.1 Media Promosi online



Gambar 2.4.1 Media Promosi melalui media cetak/Koran



2.4.2. Publikasi

Sesuai dengan tujuan utama, tersedianya lahan dan bangunan sebagai syarat usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor, sangat dibutuhkan hibah lahan dan atau bangunan dari Stakeholder eksternal dan masyarakat.

Strategi Komunikasi

Untuk menghadapi setiap jenis pemangku kepentingan maka akan digunakan akan digunakan strategi komunikasi. Adapun peta strategi komunikasi yang disusun sebagai berikut:

a. *Keep Satisfied*

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh pemangku kepentingan agar mendukung proyek perubahan yang dibuat yaitu dengan konsultasi yang regular. Dalam hal ini target proyek perubahan di Polda Sumsel agar tidak meleset dari jadwal yang ditetapkan, *project leader* secara terus menerus berkonsultasi dengan Karorena Polda Sumsel selaku mentor dan pemangku kepentingan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. *Manage Closely*

Dalam pelaksanaan proyek perubahan yang dilaksanakan di

Polda Sumsel strategi komunikasi yang digunakan untuk implementasi kegiatan-kegiatan target adalah dengan cara meningkatkan dukungan dan minat promotor terhadap proyek perubahan ini, diantaranya: konsultasi secara regular, pelaporan, diskusi, memberikan arahan dan bimbingan teknis, memantau progres kegiatan serta mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan

c. *Minimal Effort*

Untuk melaksanakan target kegiatan proyek perubahan ini *project leader* selalu melibatkan pemangku kepentingan eksternal maupun internal sehingga komunikasi dan kordinasi selalu terjalin dan sinergis. Langkah ini diambil *project leader* agar proses berbagi pengalaman dan edukasi dapat terjalin antar tim.

d. *Keep Informed*

Strategi komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan minat pemangku kepentingan terhadap proyek perubahan yaitu dengan memelihara hubungan yang baik dan sinergis diantara pemangku kepentingan.

Rincian strategi komunikasi

Adapun rincian strategi komunikasi berdasarkan pemangku kepentingan dapat digambarkan pada table berikut:

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
1	Kapolda Sumsel	Menyetujui dan mengesahkan proyek perubahan dalam bentuk Keputusan dan Jukrah Kapolda Sumsel	Memberikan laporan berkala setiap progress yang dilaksanakan
2	Karorena Polda Sumsel	Memberikan bantuan dan dukungan dari berbagai aspek terkait proyek perubahan	Konsultasi yang intensif dan memberikan laporan berkala serta memberikan arahan dan bimbingan teknis
3	Tim Efektif	Memberikan bantuan dan dukungan aspek administrasi keberlangsungan terkait dengan proyek perubahan	Memberikan arahan dan bimbingan teknis dan regulasi
4	Polres/Tabes Jajaran Polda Sumsel	- Memberikan dukungan dan masukan terkait data untuk mendukung proyek perubahan; - melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemda Kab/Kota dalam bentuk MOU/Nota Kesepahaman	Konsultasi dan berbagi data dalam hal terkait proyek perubahan, Kolaborasi dan Kerjasama
5	Pemda Kabupaten/Kota	- Memberikan dukungan dan masukan terkait data untuk mendukung proyek perubahan; - Kolaborasi dan kerja sama dengan Polri (Polres/Tabes Jajaran Polda Sumsel) dalam bentuk MOU/Nota Kesepahaman;	Kolaborasi, Konsultasi dan edukasi regulasi terkait proyek perubahan, Kolaborasi dan kerjasama
6	Masyarakat	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan	Audiensiv dan komunikasi

Tabel 2.4.2 Strategi Komunikasi

2.5. KEBERLANJUTAN

Implementasi proyek perubahan ini diharapkan tidak selesai dalam jangka pendek (4 bulan) tetapi harus dapat dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dan dianggarkan untuk beberapa lokus secara bertahap. Tentu masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, namun dapat diatasi dengan daya dan upaya dari segala pihak/stakeholder yang ada. Proyek perubahan yang telah dilaksanakan ini tentunya tidak hanya Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini, namun dapat berjalan secara berkelanjutan sebagaimana dijelaskan secara singkat dengan dengan table dibawah ini :

Tahapan kegiatan	waktu
Jangka Menengah	
Nota Kesepahaman/ Hibah Lahan dan atau bangunan dari Pemda Kab/Kota secara bertahap	Januari 2025 s.d. Juni 2025
Usulan Pembentukan Polsek/Polsubsektor secara bertahap	Januari 2025 s.d. Juni 2025
Anev Penatakelembagaan, data Satwil Polda Sumsel	Januari 2025 s.d. Juni 2025
Jukrah Anev Penataan Penatakelembagaan, data Satwil Polda Sumsel	Januari 2025 s.d. Juni 2025
Jangka Panjang	
241 Kecamatan di Provinsi Sumsel terbagi dalam daerah hukum 241 Polsek/Polsubsektor	Juli 2025 s.d. Juli 2026

Tabel 2.5.1 Keberlanjutan Proper

2.6. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

Terkait dengan hasil proyek perubahan ini terdapat beberapa hal yang menjadi *lesson learnt* dalam proses learning organisation khususnya di lingkungan Polda Sumsel.

1. Dukungan pimpinan pada semua anggota Kepolisian untuk mengembangkan kemampuan guna pemenuhan unit organisasi Polri s.d. tingkat Kecamatan;
2. Terjadinya proses pembelajaran dari semua personel khususnya Bagren Polres jirn akan pentingnya upaya Pemenuhan 1 Polsek/Polsubsektor pada 1 Kecamatan;
3. Polda Sumsel memiliki kecepatan bertindak dalam merespon tuntutan masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan pemenuhan 1 Kec 1 Polsek/Polsubsektor;
4. Terbangunnya budaya dan kesadaran akan pentingnya keberadaan unit organisasi polri s.d. di tingkat Kecamatan;
5. Terbangunnya komunikasi yang efektif di ling-kungan Polda Sumsel dengan stakeholder dan seluruh elemen masyarakat;
6. Perencanaan Program dan kegiatan di Polda Sumsel terkait

Tata Laksana /Kelembagaan menjadi lebih terstruktur;

7. Peningkatan kualitas sumber daya di Polda Sumsel;
8. Peningkatan layanan Polri terkait keamanan dan ketertiban kepada masyarakat;

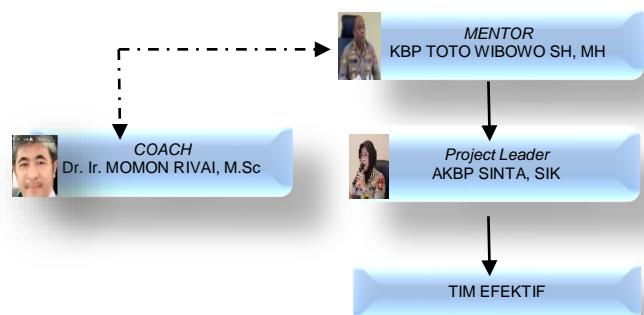


Gambar 2.6. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

2.6.1. Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi

1. Tata Kelola proyek Perubahan

Tata kelola proyek perubahan ini terdiri dari project leader, mentor, coach dan kelompok kerja dengan struktur yang terdiri dari mentor, dengan struktur dan fungsi sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.6.1 Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

Penjelasan tentang tugas tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Sponsor/Mentor : Bapak KBP TOTO WIBOWO, S.H., M.H.

1) Memberikan arahan dan persetujuan jenis perubahan rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan;

2) Memberikan masukan saran dalam mengidentifikasi permasalahan;

3) Membantu *project leader* untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perubahan;

4) Membantu *project leader* untuk menyelesaikan permasalahan di luar kewenangan *project leader*;

b. Coach : Bapak Dr. Ir. MOMON RIVAI, M.Sc

1) Memastikan *project leader* mampu mengaplikasikan esensi setiap mata diklat pada ke dalam pelaksanaan proyek perubahan;

2) Memberikan masukan dalam merancang proyek perubahan serta memastikan penetapan area perubahan sesuai dengan ruang lingkup bidang kerja dan memberikan kemanfaatan nyata;

3) Melakukan monitoring memberikan saran/tanggapan, dan memberi motivasi terhadap perkeabngan dan kemajuan rancangan dan implementasi proyek perubahan;

4) Melakukan komunikasi dengan mentor/atasan langsung mengenai kegiatan peserta selama pelaksanaan proyek perubahan;

5) Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan dalam melaksanakan proyek perubahan;

c. *Project Leader* : AKBP SINTA, S.I.K.

1) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan berkoordinasi pelaksanaan proyek perubahan;

- 2) Melakukan kerjasama dan berkomunikasi dengan stakeholders;
 - 3) Memimpin dan melaksanakan proyek perubahan;
 - 4) Melaporkan perkembangan proyek perubahan kepada mentor dan coach;
- d. Peran Tim Efektif
- 1) Koordinanator mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Koordinasi terkait kebutuhan data terhadap kegiatan strategis yang akan diarahkan Pemenuhan Akselerasi 1 Kecamatan 1 Polsek/Polsusbektor, dan Surat Kapolda Sumsel tentang Jukrah, dan SOP Usulan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan, serta Konsep Nota Kesepahaman Polri dengan Pemda Kab/Kota;
 - b) Menyampaikan perkembangan terkait penyiapan kegiatan startegis yang akan dilakukan;
 - 2) Tim pengolah Data mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Membantu dalam mengidentifikasi data kebutuhan kegiatan untuk proyek perubahan;
 - b) Mengumpulkan peraturan-peraturan yang relevan untuk mendukung prouek perubahan;
 - c) Membantu melakukan penyusunan konsep Nota Kesepahaman;
 - d) Membantu penyusunan Surat Kapolda dan SOP;
 - 3) Tim Penyusun Laporan mempunyai tugas dan
- c) Membantu *project leader* untuk melaksanakan dokumentasi dan pengumpulan data;
 - d) Membantu *project leader* untuk menyusun Surat Kapolda, SOP dan Konsep Nota Kesepahaman;

tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Membantu menyusun rencana kerja;
 - b) Membantu menyusun laporan;
 - c) Membantu menyusun Draft Nota Kesepahaman;
- 4) Tim administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a) Melakukan proses administrasi terkait dengan penyiapan rapat, Binteknis, dan dokumentasi pelaksanaan proyek perubahan;
 - b) Melakukan tata kelola persuratan;
 - c) Membantu *project leader* untuk melaksanakan dokumentasi dan pengumpulan data-data dan bukti proyek perubahan.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana proyek ini memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di Birorena Polda

Sumsel seperti perangkat komputer/laptop, ruang rapat dan server.

3. Teknologi

Teknologi yang digunakan untuk mendukung kelancaran proyek perubahan ini adalah teknologi berbasis Web dengan menggunakan server yang sudah ada di Birorena Polda Sumsel. Selain itu untuk memudahkan promosi dan pemasaran hasil proyek perubahan akan memanfaatkan media komunikasi online seperti email, website dan media/surat kabar online.

4. Anggaran

Implementasi proyek perubahan akan mengoptimalkan anggaran yang beririsan dengan kegiatan rutin dalam DIPA Satker Birorena Polda Sumsel. Untuk keberlanjutan proyek perubahan akan diusulkan pada DIPA Satker Birorena Polda Sumsel TA.2025.

2.6.2. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan implementasi proyek perubahan didukung pula dengan strategi pengembangan kompetensi yang meliputi pengembangan potensi diri dan pengembangan kompetensi pribadi, tim dan stakeholders yang akan mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan melalui bimbingan dan pendampingan (mentoring dan coaching) pada setiap tahapan kegiatan (milestones) yang terukur dan telah direncanakan sesuai jadwal sebagaimana tabel berikut :

Komponen/subkomponen	Kegiatan pengembangan diri untuk mendukung pelaksanaan proper	Kegiatan/tahapan Proper	Waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan diri	
			Rencana	Realisasi
Komponen Integritas : Konsistensi, yaitu memiliki prinsip yang kuat tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja	Membangun kolaborasi dan jejaring kerjasama serta menyinkronkan kepentingan untuk mendapatkan dukungan gagasan perubahan dengan menerapkan nilai-nilai integritas	Membentuk Tim Efektif dan membangun dukungan pemangku kepentingan dengan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Minggu Ke II Bulan September 2024 Rapat Minggu Ke II Bulan Oktober 2024	9 September 2024 (Rapat Koordinasi) 10 Oktober 2024
Komponen kerjasama, Subkomponen : eksternal yaitu membangun kerjasama atau sinergidengan pihak eksternal/pemangku kepentingan dalam rangka mencapai target	Melakukan koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjamin kinerja di lingkup unit kerja untuk mendukung pencapaian target	Membangun komitmen dengan Stakeholder	September s.d. November 2024	5 September s.d. November 2024

Komponen mengelola Perubahan Subkomponen : orientasi pelayanan publik, mampu memonitoring dan mengevaluasi, kendala yang ada guna pencapaian target proper	Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas sesuai dengan target kinerja yang diberikan	Asistensi Ke Polres/Tabes	Minggu I Bulan Oktober	2 s.d. 4 Okt 2024
Komponen, mengelola Perubahan Subkomponen, orientasi pelayanan publik, mampu memonitoring, memperhatikan dan menggantikan dampak isu jangka panjang dalam hal kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif dan profesional	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku	Penyusunan SOP	Minggu Ke III Bln Oktober	17 Oktober 2024
Komponen, mengelola Perubahan Subkomponen, orientasi pelayanan publik, mampu memonitoring, memperhatikan dan menggantikan dampak isu jangka panjang dalam hal kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif dan profesional	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku	Penyusunan Draft Nota Kesepahaman	Minggu ke. III Bulan Oktober 2024	21 Oktober 2024
Komponen, mengelola Perubahan Subkomponen, orientasi pelayanan publik, mampu memonitoring, memperhatikan dan menggantikan dampak isu jangka panjang dalam hal kebutuhan pemangku kepentingan	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku	Penyusunan Keputusan Kapolda dan Surat Kapolda Sumsel	Minggu ke. III Bulan Oktober 2024	22 s.d. 23 Oktober 2024

n yang transparan, objektif dan profesional				
Komponen mengelola Perubahan Sub Komponen : orientasi pelayanan publik, mampu memonitoring dan mengevaluasi, kendala yang ada guna pencapaian target proper	Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas sesuai dengan target kinerja yang diberikan	Bintek Operatos ABK dan SIK3 Polres/Tabes	Minggu ke III Nop 2024	18 s.d. 19 Nop 2024
Komponen, Mengelola Perubahan Sub Komponen, orientasi hasil yaitu memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal, eksternal agar selaras dengan sasaran strategis Polda	Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyesuaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan	Usulan Pembentukan Polsek/Pol subsektor ke Kapolri	September s.d. Desember 2024	15 Oktober 2024

Tabel 2.6.2.1 Kertas Kerja Pengembangan Potensi Diri

Keberhasilan mencapai tujuan pada Tim Efektif yang mempunyai tanggung jawab dan kemampuan sendiri-sendiri, lebih efektif dan efisien dengan dukungan penuh dari *project leader*.

Yang terdapat Proper	Perubahan kompetensi yang dibutuhkan	Cara pengembangannya	Realisasi
Tim Efektif dan Stakeholder internal	Mampu bekerjasama secara efektif untuk akselerasi implementasi proyek perubahan	Diskusi, Rapat Koordinasi	100 %
Pemerintah Daerah Kab/Kota	Memahami, mengerti serta menjadikan Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 Kec 1 Polsek/Polsubsektor sebagai parameter indikator Harkantibmas di	Koordinasi dan konsultasi secara konsisten dlm rangka komitmen pimpinan tertuang dalam nota kesepahaman atau pernyataan dukungan	100 %

	Kab/Kota		
Media	Mampu memahami konsep inovasi dan mau bekerjasama dengan menyampaikan informasi ke publik	Komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kebermanfaatan unit organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor di tingkat kecamatan	100 %
Masyarakat	Mau terlibat langsung dalam akselerasi pemenuhan organisasi setingkat Polsek/Polsubsektor di tiap Kecamatan	Dukungan dalam Akselerasi Pemenuhan Unit Organisasi 1 Kec 1 Polsek/Polsubsektor	100 %

Gambar 2.6.2.2 Kertas Kerja Pengembangan Kompetensi

Tahapan terakhir dari strategi pengembangan kompetensi ini ketika tim telah menjalani tahap pencapaian tujuan organisasi maka tim yang sudah dibentuk dapat dibubarkan dengan memberikan apresiasi bagi kerja tim yang telah dilakukan.

2.7. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN

2.7.1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan

sebagaimana suatu kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh Negara. Ruang lingkup Manajemen Pemerintahan dapat terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu :

1. Perencanaan pemerintahan yang merupakan kesatuan tata cara perencanaan pemabngunan untuk menghasilkan rencana-rencana pemabngunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

- penyelenggaraan Negara, baik pusat maupun daerah;
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan yaitu lembaga organisasi/pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan Negara melaksanakan tugas sesuai dengan unit kerja yang dibentuk;
 3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan yaitu aparatur sipil Negara yang harus melayani masyarakat dengan mengefektifkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan termasuk dengan transformasi digital organisasi;
 4. Control pemerintahan merupakan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
- Mata Pelatihan manajemen pemerintahan memiliki kontribusi penting dalam proyek perubahan penyusunan regulasi, SOP, Nota Kesepahaman, hal ini selaras dengan fungsi manajemen pemerintahan yaitu Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan yaitu lembaga organisasi/pemerintahan sebagai

unsur penyelenggaraan Negara melaksanakan tugas sesuai dengan unit kerja yang dibentuk.

Dengan memahami dan mengaplikasi prinsip-prinsip manajemen pemerintahan, penulis dapat memebrikan kontribusi nyata dalam proyek perubahan yang telah digagas.

2.7.2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

Subjek hukum hak asasi manusia sama dengan subjek hukum internasional, karena hak asasi manusia bersifat universal dan dapat dikatakan berasal dari hukum internasional. Pada prinsipnya, subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni subjek hukum sebagai pemangku kewajiban dan subjek hukum sebagai pemangku hak. Sebagai pemangku kewajiban terdapat tiga kelompok besar, yakni Negara, Kelompok, dan perusahaan. Sebagai pemangku hak terdapat dua kelompok, yakni individu dan kelompok.

Kewajiban Negara untuk Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi

Secara internasional, kewajiban negara dalam hak asasi manusia dapat dilihat melalui tiga kerangka pendekatan (*framework*) atau disebut *tripartite classification*, yaitu kewajiban untuk

menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*). Kewajiban **Menghormati**, artinya Negara wajib untuk tidak turut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

Kewajiban **Melindungi**, artinya Negara wajib bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi warganya dari pelanggaran oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, negara wajib mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Kewajiban **Memenuhi**, artinya Negara wajib untuk menggunakan seluruh sumber daya dan kebijakan untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

Peran Negara dalam hak asasi manusia adalah ditempatkan sebagai pemangku utama kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan hak asasi manusia. Kewajiban Negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia, secara umum terbagi menjadi dua, yakni kewajiban positif (kewajiban untuk melakukan sesuatu) dan kewajiban negatif (kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu).

Secara lebih detail, kewajiban tersebut terbagi menjadi kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Lebih lanjut, Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab memastikan dan menjamin terpenuhinya kewajibannya tersebut.

Dalam proyek Perubahan ini, penulis menyadari bahwa Polri adalah merupakan Aparat Pemerintah memiliki peran dan kewajiban **Melindungi**, artinya Negara wajib bertindak aktif untuk memberikan

jaminan perlindungan hak asasi warganya dari pelanggaran oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, negara wajib mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga, hal ini sejalan dengan Strategi Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui pemenuhan unit organisasi 1 kecamatan 1 Polsek/Polsubsektor agar terjamin harkatibmas bagi warga masyarakat.

2.7.3. Membina Kerjasama Tim

Cara-cara efektif untuk membangun dan mempertahankan kerjasama tim yang solid. Peserta akan belajar tentang dinamika kelompok, teknik membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan

meningkatkan komunikasi antar anggota tim.

- a. **Komunikasi efektif:** Komunikasi yang baik dan lancar adalah kunci utama dalam membangun tim yang solid. Komunikasi yang baik dapat dipelajari dengan berlatih dan bersabar;
- b. **Memiliki visi dan misi yang sama:** Pastikan semua anggota tim memiliki visi dan misi yang sama;
- c. **Membangun rasa percaya:** Saling percaya adalah komponen penting untuk membangun kerja sama tim;
- d. **Memiliki tanggung jawab yang jelas:** Pastikan setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- e. **Membangun lingkungan yang kondusif:** Ciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif;
- f. **Membangun hubungan yang baik:** Kenali karakteristik anggota tim untuk membangun hubungan yang baik;
- g. **Menghargai pendapat anggota tim:** Hormati dan hargai pendapat setiap anggota tim;
- h. **Melakukan evaluasi secara berkala:** Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengatasi masalah dan konflik yang mungkin terjadi;
- i. **Menyediakan fasilitas yang memadai:** Pastikan tim memiliki fasilitas yang memadai untuk bekerja;

- j. **Membuat kegiatan di luar kantor:** Adakan kegiatan di luar kantor atau outing untuk mempererat hubungan antar anggota tim.

Dengan demikian melalui mata pelatihan Membina Kerjasama Tim, penulis dapat memastikan Tim Efektif dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan proyek perubahan.

2.8. LESSON LEARNT KEPEMIMPINAN

Beberapa pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh dari proses pengerjaan proyek perubahan ini diantaranya adalah:

1. dukungan pimpinan (Kapolda Sumsel) merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keberlanjutan proyek perubahan jangka menengah dan jangka Panjang;
2. budaya inovasi dan adaptif di Polda Sumsel perlu ditingkatkan untuk membiasakan agar organisasi dapat lebih adaptif terhadap perubahan;
3. kerja sama, kolaborasi dan kordinasi baik dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal (Pemda Kab/Kota dan masyarakat) sangat diperlukan karena pada saat perancangan dan pelaksanaan proyek

- perubahan tidak dapat berjalan sendiri;
4. komunikasi yang terjalin dengan baik dengan semua pemangku kepentingan merupakan kunci utama untuk mendapatkan dukungan serta menyelesaikan permasalahan yang ada;
 5. perencanaan program dan kegiatan yang efektif mendorong keberhasilan Polda Sumsel untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan pelayanan Kepolisian dalam memberikan perlindungan pengayoman pelayanan dan kepada masyarakat.

Kendala	solusi
Pergantian Pimpinan/Mutasi Kapolda Sumsel	Melakukan pembagian tugas yang lebih efektif dan kerjasama dengan tim efektif sehingga tahapan target proyek perubahan dapat diselesaikan
Agenda isidentiiil dari Mabes Polri, yang mewajibkan kehadiran Porject leader	Melakukan pembagian tugas yang lebih efektif dan kerjasama dengan tim efektif sehingga tahapan target proyek perubahan dapat diselesaikan
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemda Kab/Kota memerlukan proses yang lama karena tahapan birokrasi yang harus dilakukan	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Baghukum dan Sekda sampai proses penandatanganan Nota Kesepahaman ditandatangani
Hibah Lahan/bangunan memerlukan proses yang lama	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Pemda Kab/Kota sd. Adanya Hibah lahan/bangunan

Tabel 2.9. Kendala dan Solusi

2.9. KENDALA DAN SOLUSI

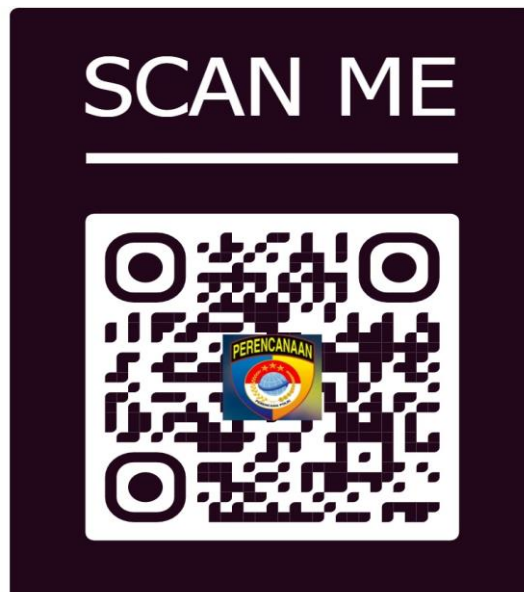
Selama mengimplementasikan proyek perubahan pada tahapan kegiatan jangka pendek ditemui beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan proyek perubahan sedikit terlambat.

Beberapa kendala selama melaksanakan tahapan kegiatan jangka pendek adalah :



BAB III PENUTUP

https://drive.google.com/drive/folders/1zy6BDOuVNvYoFAWpFGYgN5U-CvR8aEdU?usp=drive_link



LAN RI – PUSDIKMIN POLRI
PKN TK.II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

BAB III PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

1. proyek perubahan ini berangkat dari permasalahan akan pentingnya pemahaman Rasa Aman bagi Masyarakat sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan Polda Sumsel untuk memberikan rasa aman dan terciptanya ketertiban di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai ukuran kinerjanya;
2. terobosan yang dilakukan adalah menciptakan strategi peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel Melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor;
3. serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek perubahan ini adalah:
 - a. penerbitan regulasi yaitu surat Kapolda SUMSEL tentang Jukrah Polsek dan Polres sebagai Lini Terdepan Pelayanan;
 - b. Pembuatan SOP Polda Sumsel tentang Pembentukan Tipe Kesatuan Kewilayah Setingkat Polsek/Polsubsektor;

- c. Nota Kesepahaman antara Polri (Polres/tabs jajaran Polda Sumsel dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) tentang Peningkatan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor;
- d. Asistensi kepada personel Bag Ren Polres/tabs jajaran Polda Sumsel;
- e. Analisis dan Evaluasi (Anev) kegiatan Penatakelembagaan khususnya Pembentukan Polsek/Polsubsektor di daerah hukum Polda Sumsel.

3.2 KOMITMEN TINDAK LANJUT

Upaya untuk meningkatkan Layanan Kepolisian Polda Sumsel melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor, tidak berhenti di jangka pendek pelaksanaan Proyek Perubahan, akan tetapi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Semakin terpenuhi 241 Kecamatan yang ada di Provinsi Sumsel dengan keberadaan Polsek/Polsubsektor di tiap Kecamatan yang **terbentuk** menunjukkan adanya



peningkatan kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, karena sebaran layanan Personel sampai di tingkat Polsek merupakan garda terdepan Pelayanan Polri. Oleh karenanya strategi peningkatan layanan Kepolisian melalui Akselerasi Pemenuhan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Polsek/Polsubsektor akan terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan berbagai upaya mewujudkannya.

Daftar Pustaka

- ✚ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ✚ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ✚ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Kepolisian Daerah;
- ✚ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Kepolisian Daerah;
- ✚ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ✚ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- ✚ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ✚ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ✚ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang mekanisme pengelolaan hibah di Polri;
- ✚ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ✚ Abdullah, Kasman, 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, jurnal Meritokrasi Vo. 1 No. 1, Makasar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
- ✚ Arif, Mirrian Sjofoyan (et.al) 2019. Manajemen Pemerintahan. Banten : CV Dwicitra Grafindo;
- ✚ Modul HAM 4, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Anggarani Utama Dewi, SH & Elis Widyaningsih, SH, CN, MH, Kemenkum Ham Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Depok 2021;
- ✚ ASN Berpijar, Membina Kerjasama Tim, Arief Ardi Nugroho, faounder Kiriminaja;

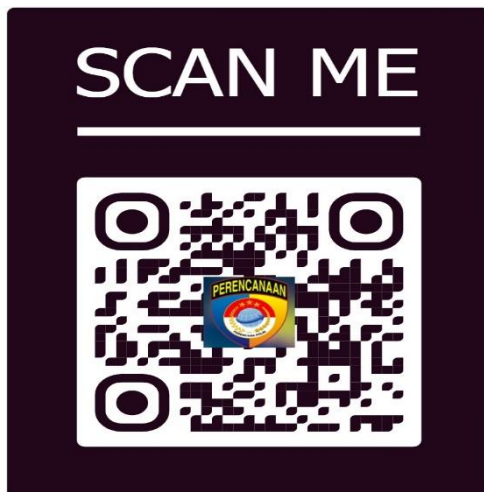


LAMPIRAN – LAMPIRAN

**STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN
KEPOLISIAN POLDA SUMSEL
MELALUI AKSELERASI
PEMENUHAN UNIT ORGANISASI
1 (SATU) KECAMATAN
1 (SATU) POLSEK/POLSUBSEKTOR**

Lampiran Proyek Perubahan dapat di download di link berikut :

[https://drive.google.com/drive/folders/1zy6BD
OuVNvYoFAWpFGYgN5U-
CvR8aEdU?usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/1zy6BD OuVNvYoFAWpFGYgN5U-CvR8aEdU?usp=drive_link)



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TK II ANGKATAN XXXI
TAHUN 2024**

**POLSEK/POLSUBSEKTOR
GARDA TERDEPAN PELAYANAN POLRI**



**LAN RI – PUSDIKMIN POLRI
PKN TK.II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024**